



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK PERUBAHAN BI RATE TERHADAP
JUMLAH PEMBERIAN KREDIT OLEH KELOMPOK BANK
MENURUT JUMLAH ASSET YANG DIMILIKI**

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Ekonomi

**TITIN SUSBIANTINI SOEKASNO
0806430626**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN
JAKARTA
JULI 2010**

Universitas Indonesia



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK PERUBAHAN BI RATE TERHADAP
JUMLAH PEMBERIAN KREDIT OLEH KELOMPOK BANK
MENURUT JUMLAH ASSET YANG DIMILIKI**

**TITIN SUSBIANTINI SOEKASNO
0806430626**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN
PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN
JAKARTA
JULI 2010**

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T., hanya karena ridho-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam bagi Rasulullah S.A.W. yang telah membuka dan memberi tauladan pada jalan yang diridhoi-Nya.

Terinspirasi dari ketertarikan atas peranan bank sentral dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter, maka disusunlah tesis yang berjudul “DAMPAK PERUBAHAN BI RATE TERHADAP JUMLAH PEMBERIAN KREDIT OLEH KELOMPOK BANK MENURUT JUMLAH ASSET YANG DIMILIKI”.

Penyelesaian penulisan tesis ini tidak akan terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

Orang tua dan mertua penulis yang tidak hentinya memberikan dorongan semangat dan memanjatkan doa untuk keberhasilan penulis. Semoga Allah senantiasa melindungi dan mengasihi beliau serta penulis diberikan kesempatan untuk selalu berbakti kepada beliau.

Ibu Dr. Eugenia Mardanugraha, yang telah membimbing dan memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian penulisan tesis ini. Terima kasih atas kesabaran dan waktu yang diberikan dalam membimbing penulis.

Staf Pengajar yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat dan segenap karyawan/wati sekretariat Program magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia yang telah banyak membantu kelancaran penyelesaian studi penulis.

Rekan-rekan serta atasan penulis di Bank Indonesia yang tercinta, Fitri, Siska, Bp. Jalius serta bunda Uti yang sangat penulis hormati, terima kasih atas dukungan dan pengertian yang sangat tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis, semoga kekeluargaan yang telah terjalin akan selalu terjaga. Serta untuk mba ferdiati dan mba wida atas dukungan datanya,

Universitas Indonesia

terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga Allah membalas kebaikan rekan-rekan.

Akhir kata, dengan sepenuh hati penulis berterima kasih kepada suami tercinta, Papa Gugi yang telah memberikan dukungan moral dan materil setiap waktu, serta dengan penuh kesabaran dan pengertian yang sangat besar bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Kemudian dengan sepenuh hati jula penulis berterima kasih kepada ananda tercinta Danish yang dengan keterbatasan pemahamannya harus mengerti kesibukan mamanya yang sedang menyelesaikan tugas sekolah yang cukup menyita waktu kebersamaan. Semoga Allah selalu membalah ketulusanmu dengan melindungi dan melimpahi kasih sayang-Nya. Amiin .

Jakarta, Juli 2010

Titin Susbiantini Soekasno

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar

Nama : Titin Susbiantini Soekasno

NPM : 0806430626

Tanda Tangan :

Tanggal :

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Titin Susbiantini Soekasno
 Nomor Mahasiswa : 0806430626
 Program Studi : Kebijakan Publik
 Kekhususan : Ekonomi Perbankan
 Judul Tesis : Dampak Perubahan BI Rate Terhadap Jumlah Pemberian
 Kredit oleh Kelompok Bank Menurut Jumlah Asset yang
 Dimiliki

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Eugenia Mardanugraha

Penguji : Arindra A. Zainal, Ph.D

Penguji : Aris Yunanto, M.SE.

Ditetapkan di : Salemba

Tanggal : 22 Juli 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar

Nama : Titin Susbiantini Soekasno

NPM : 0806430626

Tanda Tangan :

Tanggal :

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titin Susbiantini Soekasno
 NPM : 0806430626
 Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
 Departemen :
 Fakultas : Ekonomi
 Jenis karya : ~~Skripsi~~/Tesis/~~Disertasi~~

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dampak Perubahan BI Rate terhadap Pemberian Kredit Oleh Kelompok Bank Menurut Jumlah Aset yang Dimiliki

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
 Pada tanggal : Juli 2010
 Yang menyatakan

(Titin Susbiantini Soekasno)

ABSTRAK

Nama : Titin Susbiantini Soekasno
Program Studi : Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : DAMPAK PERUBAHAN BI RATE TERHADAP JUMLAH PEMBERIAN KREDIT OLEH KELOMPOK BANK MENURUT JUMLAH ASSET YANG DIMILIKI”.

Tesis ini membahas dampak perubahan BI Rate terhadap jumlah pemberian kredit oleh bank, dengan pengelompokan bank berdasarkan jumlah kepemilikan aset. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dan diperoleh hasil bahwa BI Rate memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan jumlah kredit yang diberikan oleh bank. Dari empat kelompok bank terdapat dua kelompok bank besar yang memiliki porsi sangat besar yang perubahan jumlah kreditnya tidak sesuai dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang dicerminkan dengan perubahan BI Rate. Secara keseluruhan diperoleh kesimpulan bahwa kelompok bank yang memberikan respon pemberian kredit sesuai arah kebijakan moneter adalah kelompok bank kecil.

ABSTRACT

Name : Titin Susbiantini Soekasno
Study Program : Planning and Public Policy
Title : EFFECT OF BI RATE'S CHANGES TO THE AMOUNT OF CREDIT GIVEN BY BANK'S GROUP DIVIDED BY THE AMOUNT OF ASSETS HOLD.

This thesis describe about the effect of BI Rate's changes to the amount of credit given by bank's group divided by the amount of assets hold. We used multiple regression method to estimate the model and find evidence that BI Rate have a significant effect to the amount of credit given by banks in all groups. We divided banks into four groups classify by the amount of assets hold, and we found there are two groups which have a large share in banking industry gave the different respond to the monetary policy goals. This study find evidence that only small banks give respond to the changes of monetary policy along with monetary policy goals.

DAFTAR ISI

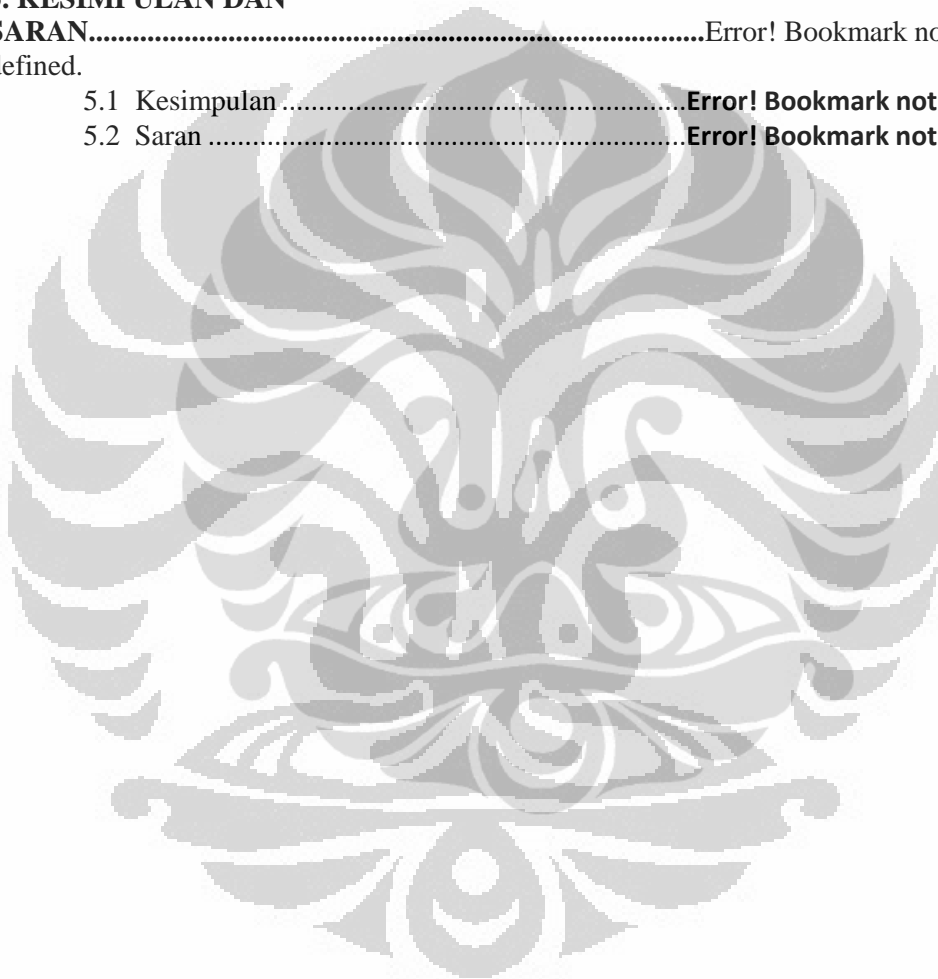
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PUSTAKA	58
1.	
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Perumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Hipotesis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
2. TINJAUAN	
LITERATUR.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Kebijakan Moneter di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
2.2. Struktur Perbankan Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Perkembangan Struktur Perbankan Indonesia ...	Error! Bookmark not defined.
2.3. Penelitian Sebelumnya.....	Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Ruby P. Kishan and Timothy P. Opiela (2000) ...	Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Phillip Engler dan Terhi Jokipii (2007) ..	Error! Bookmark not defined.
3. METODOLOGI PENELITIAN	
.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Kerangka Model.....	Error! Bookmark not defined.
3.3. Metodologi Ekonometri.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Model Estimasi Regresi Linier	Error! Bookmark not defined.
3.3.3 Uji Hipotesa.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.3.1 Uji Kesesuaian (R^2).....	Error! Bookmark not defined.
3.3.3.2 Uji Signifikansi Model (Uji Fisher / F) ...	Error! Bookmark not defined.
defined.	
3.3.3.3 Uji Secara Parsial (Uji T)	Error! Bookmark not defined.
3.3.4 Uji Asumsi OLS	Error! Bookmark not defined.
3.3.4.1 Uji Multikolinieritas	Error! Bookmark not defined.
3.3.4.2 Uji Heteroskedastisitas	Error! Bookmark not defined.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
.....	Error! Bookmark not defined.

- 5.1 Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset < Rp. 1 Trilyun.....**Error! Bookmark not defined.**
- 5.2 Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun... **Error! Bookmark not defined.**
- 5.3 Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun.. **Error! Bookmark not defined.**
- 5.4 Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset > Rp. 50 Trilyun**Error! Bookmark not defined.**
- 5.3 Kebijakan Bank Indonesia**Error! Bookmark not defined.**

5. KESIMPULAN DAN

SARAN.....**Error! Bookmark not defined.**

- 5.1 Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**
- 5.2 Saran**Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan perbankan dan sistem pembayaran. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan.

Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 merupakan *shock* bagi stabilitas moneter dan perekonomian Indonesia yang menuntut adanya kebijakan moneter yang tepat untuk mengatasi dampak

gangguan terhadap stabilitas moneter tersebut. Adapun kebijakan moneter yang diambil Bank Indonesia untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar terhadap penurunan perekonomian nasional akibat terjadinya krisis global pada tahun 2008 adalah berupa penurunan BI Rate sampai mencapai angka 6.50 % pada bulan Oktober 2009. Penurunan BI Rate diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan suku bunga kredit sehingga hal tersebut akan kembali menggerakkan roda perekonomian nasional. Selain hal tersebut penurunan BI Rate diharapkan dapat menekan tingkat inflasi yang dapat semakin meningkatkan beban hidup masyarakat dengan terjadinya penurunan pendapatan real masyarakat.

Perubahan BI Rate merupakan indikator penting yang mencerminkan arah kebijakan moneter Indonesia dan akan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia melalui beberapa jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter yang pada akhirnya ditujukan untuk dapat mempengaruhi pergerakan roda perekonomian. Mekanisme transmisi kebijakan moneter dapat bergerak melalui sektor perbankan yang merupakan lembaga perantara yang akan mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memiliki kekurangan dana.

Bank Indonesia juga memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Kredit perbankan merupakan sumber dana tertinggi dalam proses pembangunan perekonomian di Indonesia yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian. Oleh sebab itu, peranan perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana sangat penting perannya bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal tersebut menggambarkan pentingnya stabilitas sektor perbankan karena kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian.

Untuk mengantisipasi dampak gejolak ekonomi dan keuangan global yang semakin berpotensi mengurangi kecukupan likuiditas valuta asing dan rupiah perbankan, Bank Indonesia menempuh kebijakan pelonggaran likuiditas melalui

penurunan giro wajib minimum (GWM) untuk memberikan fleksibilitas kepada perbankan dalam mengelola likuiditasnya sehingga tidak terjadi keketatan likuiditas seperti yang dialami banyak negara lain dan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem perbankan. Perubahan giro wajib minimum tersebut berupa penurunan GWM dari 9.01% menjadi 7.5% untuk GWM rupiah dan penurunan GWM dari 3 % menjadi 1% untuk valas. Kebijakan ini akan berpotensi menambah likuiditas perbankan dalam bentuk rupiah sekitar Rp. 50,0 triliun dan dalam valas sebesar US\$ 721 juta. Pemenuhan GWM sekunder diberikan masa transisi 1 tahun guna memberikan ruang bagi perbankan untuk melakukan penyesuaian terkait dengan aturan tersebut sehingga tidak memberikan tekanan di pasar uang.

Struktur perbankan Indonesia yang terdiri dari berbagai kelompok bank yang memiliki jumlah aset besar dan kecil akan memungkinkan terjadinya reaksi yang berbeda dari masing-masing kelompok bank atas kebijakan moneter terjadi. Dimana hal tersebut berkaitan dengan kemampuan masing-masing bank dalam merespon kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bank yang memiliki modal besar melakukan kebijakan yang bersifat *countercyclical* berupa pemberian kredit yang lebih tinggi pada saat terjadi kenaikan bunga sedangkan bank yang memiliki modal kecil melakukan kebijakan yang bersifat *procyclical* berupa pemberian kredit yang lebih rendah pada saat terjadi kenaikan bunga. Bank dengan permodalan yang kecil adalah kelompok bank yang paling terpengaruh oleh perubahan kebijakan moneter ketat dari bank sentral, sehingga bank kecil cenderung akan menurunkan kreditnya pada saat terjadi kebijakan moneter ketat. Hal tersebut selain karena keterbatasan likuiditas dan sumber pendanaan pada bank kecil juga karena rendahnya efisiensi pada bank kecil sehingga menimbulkan biaya yang tinggi pada operasional bank kecil (Kishan & Opiela, 2000).

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis atas perbedaan respon dari kelompok bank tersebut agar kebijakan moneter dapat bertransmisi sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh bank sentral. Dengan demikian paper ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan pembagian kelompok bank menurut

modal yang dimiliki. Hal ini juga ditujukan untuk melihat efektivitas penerapan teori mekanisme transmisi melalui *bank lending channel* di Indonesia. Efektivitas mekanisme transmisi melalui *lending channel* menjadi penting bagi negara berkembang seperti Indonesia karena peranan perbankan khususnya kredit sangat penting bagi perekonomian negara berkembang. Hal tersebut karena bank bukan hanya merupakan sumber utama pendanaan bagi perusahaan kecil, menengah maupun besar tetapi perkembangan perbankan juga mencerminkan pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Sebagai contoh, perkembangan kredit dari sektor perbankan di Indonesia pada selama periode 2001 – 2004 mencapai pangsa 77% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh seluruh lembaga keuangan termasuk bank, pasar uang dan pasar modal, sehingga pertumbuhan dan penurunan perbankan memiliki korelasi yang sangat kuat dengan perkembangan perekonomian Indonesia (Halim Alamsyah et.al, 2005)

1.2 Perumusan Masalah

Struktur perbankan Indonesia yang terdiri dari sejumlah bank dengan jumlah kepemilikan aset yang berbeda dapat berdampak pada perbedaan respon yang diberikan terhadap perubahan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruby P. Kishan & Opiela (2000) terhadap perbankan di Amerika Serikat pada tahun 1980 sampai dengan 1995 yang bertujuan untuk membuktikan berjalannya mekanisme transmisi melalui jalur kredit, dengan mengelompokkan bank menurut jumlah aset yang dimiliki dan tingkat capital leverage ratio. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Phillip Engler dan Terhi Jokipii (2007) terhadap perbankan Austria pada periode 1997 sampai dengan 2003 yang bertujuan menganalisis bagaimana kelebihan cadangan modal yang dimiliki bank dapat mempengaruhi keputusan pemberian kredit bank serta dampaknya terhadap transmisi kebijakan moneter dari bank sentral terhadap perekonomian di Austria. Kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil yang senada yaitu bahwa kelompok bank yang lebih *responsif* terhadap perubahan kebijakan moneter

adalah kelompok bank kecil, hal ini berarti transmisi kebijakan moneter bergerak lebih efektif pada kelompok bank kecil.

Kesimpulan pada kedua penelitian di atas menjadikan pentingnya dilakukan studi terhadap perbedaan respon yang diberikan oleh perbankan Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh bank. Hal tersebut menjadi penting karena apabila dilihat dari pangsa aset yang dimiliki, perbankan Indonesia didominasi oleh kelompok bank besar sehingga apabila kelompok bank besar di Indonesia berlaku seperti kondisi pada kedua penelitian tersebut dalam hal respon terhadap kebijakan moneter, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam efektivitas berjalannya transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan di Indonesia. Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah respon yang diberikan oleh kelompok bank berdasarkan jumlah kepemilikan aset dalam bentuk pemberian kredit, terhadap perubahan kebijakan moneter yang dicerminkan dengan perubahan BI Rate?
2. Bagaimanakah dampak perubahan jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank pada kelompok bank berdasarkan jumlah kepemilikan aset terhadap jumlah kredit yang diberikan?
3. Bagaimanakah dampak perubahan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh bank pada kelompok bank berdasarkan jumlah kepemilikan aset terhadap jumlah kredit yang diberikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dampak BI Rate terhadap jumlah kredit yang diberikan oleh bank, menurut kelompok berdasarkan jumlah aset yang dimiliki.
2. Mengetahui dampak jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki terhadap jumlah kredit yang diberikan oleh bank menurut kelompok berdasarkan aset yang dimiliki.

3. Mengetahui dampak jumlah surat berharga yang dimiliki oleh bank terhadap jumlah kredit yang diberikan oleh bank menurut kelompok berdasarkan aset yang dimiliki.

1.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BI Rate memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan jumlah kredit yang diberikan oleh bank pada kelompok bank berdasarkan jumlah kepemilikan aset
2. Dana pihak ketiga memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan jumlah kredit yang diberikan oleh bank pada kelompok bank berdasarkan jumlah kepemilikan aset
3. Jumlah surat berharga yang dimiliki bank memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan jumlah kredit yang diberikan oleh bank pada kelompok bank berdasarkan jumlah kepemilikan aset.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini setelah bab ini akan dilanjutkan dengan bab-bab sebagai berikut:

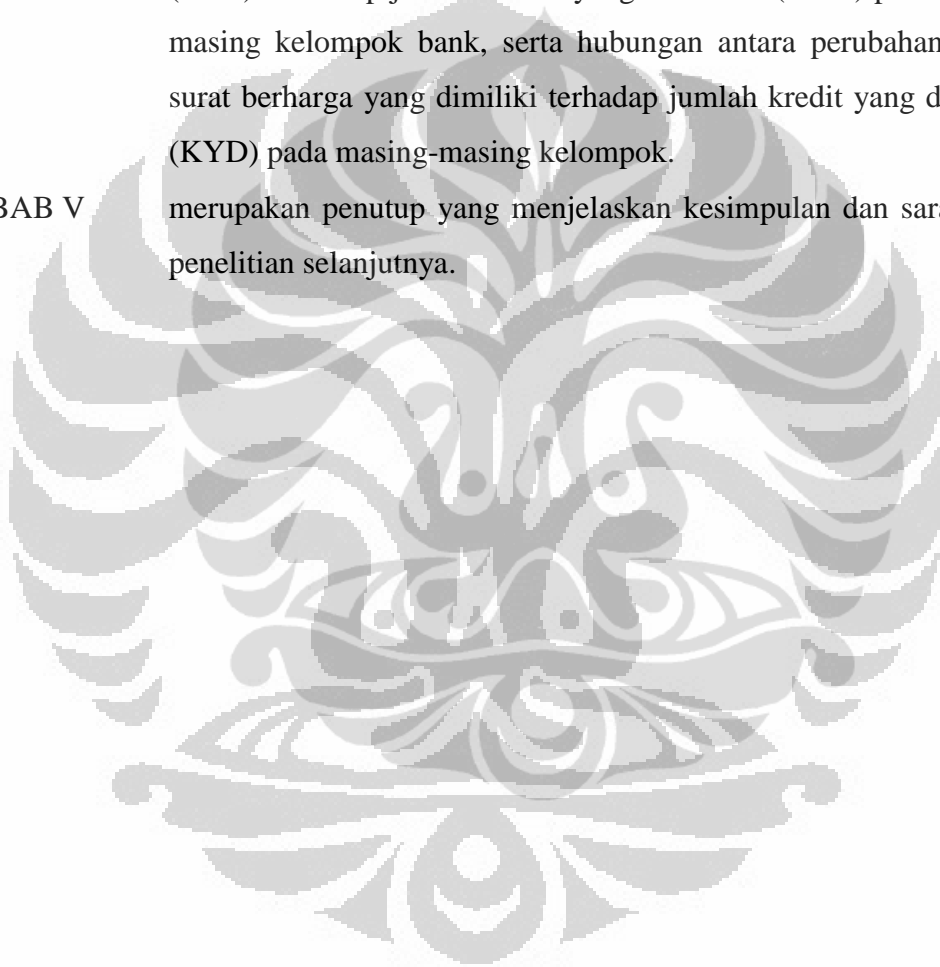
BAB II menjabarkan mengenai landasan teori serta penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dasar teori mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter serta teori mengenai pengelolaan dana bank. Bab ini juga akan menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di luar Indonesia mengemai perbedaan respon yang diberikan oleh bank besar dan bank kecil atas perubahan kebijakan moneter.

BAB III menguraikan tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam studi ini, yaitu metode analisis regresi berganda. Dalam bab ini juga dijelaskan beberapa metode pengujian hipotesis berupa

pengujian pelanggaran asumsi klasik. Selain metode juga dijelaskan sumber data dan metode pengujian model.

BAB IV membahas tentang hasil penelitian yaitu mengenai perilaku terkait pemberian kredit masing-masing kelompok bank berdasarkan jumlah kepemilikan aset dalam hal respon yang diberikan terhadap perubahan kebijakan moneter yang dicerminkan dengan perubahan BI Rate, hubungan antara perubahan jumlah dana pihak ketiga (DPK) terhadap jumlah kredit yang diberikan (KYD) pada masing-masing kelompok bank, serta hubungan antara perubahan jumlah surat berharga yang dimiliki terhadap jumlah kredit yang diberikan (KYD) pada masing-masing kelompok.

BAB V merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran bagi penelitian selanjutnya.



BAB II TINJAUAN LITERATUR

2.1 Kebijakan Moneter di Indonesia

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter di Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah¹. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Kebijakan dengan kerangka ITF memiliki satu sasaran utama, yaitu sasaran inflasi, yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian (*overriding objective*) dan acuan (*nominal anchor*) kebijakan moneter. ITF bersifat antisipatif mengingat adanya efek tunda (*lag*) kebijakan moneter dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut²:

- Proyeksi inflasi dan PDB 2 tahun ke depan
- Faktor-faktor resiko / shocks dalam 2 tahun ke depan
- Sasaran inflasi yang ingin dicapai

¹ Undang-Undang No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia

² Materi sosialisasi *inflation targeting framework* – Direktorat Kebijakan Moneter (DKM) - Bank Indonesia

Sasaran akhir ITF yang yang diketahui oleh publik akan mendisiplinkan kebijakan moneter, serta sasaran inflasi yang kredibel akan digunakan oleh publik sebagai anchor ekspektasi inflasi. Penetapan sasaran inflasi selalu memperhatikan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi (sektor riil) . Setelah sasaran inflasi ditetapkan dan diumumkan ke publik, maka kebijakan moneter semata-mata diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Jika terdapat konflik antara pencapaian sasaran inflasi dengan sasaran lainnya (pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, neraca pembayaran, dll) maka yang dijadikan prioritas adalah pada pencapaian inflasi.

Dengan kerangka ITF, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut. Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan sejumlah informasi yang dapat menggambarkan kondisi inflasi ke depan. Jika proyeksi inflasi sudah tidak kompatibel dengan sasaran, Bank Indonesia melakukan respon dengan menggunakan instrumen yang dimiliki. Misalnya jika proyeksi inflasi telah melampaui sasaran, maka Bank Indonesia akan cenderung melakukan pengetatan moneter. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara *forward looking*, artinya perubahan *stance* kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, *stance* kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi.

Kemudian secara reguler, Bank Indonesia menjelaskan kepada publik mengenai asesmen terhadap kondisi inflasi dan outlook ke depan serta keputusan yang diambil. Jika sasaran inflasi tidak tercapai maka diperlukan penjelasan kepada publik dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengembalikan inflasi sesuai dengan sasarannya.

Indikator utama yang digunakan dalam menentukan respon kebijakan moneter adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penentuan respon kebijakan moneter mempertimbangkan perilaku keterkaitan antar variabel ekonomi dan transmisi kebijakan moneter. Perumusan kebijakan moneter memperhatikan pula kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

Respon kebijakan moneter ditetapkan untuk menjamin agar pergerakan inflasi dan ekonomi ke depan tetap berada pada jalur pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan (konsistensi). Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak berubahnya BI Rate. Perubahan (kenaikan atau penurunan) BI Rate dilakukan secara konsisten dan bertahap dan dilakukan dalam kelipatan 25 basis points (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.

BI Rate adalah suku bunga instrumen sinyaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) triwulan untuk berlaku selama triwulan berjalan (satu triwulan), kecuali ditetapkan berbeda oleh RDG bulanan dalam triwulan yang sama. BI Rate diumumkan ke publik segera setelah ditetapkan dalam RDG sebagai sinyal *stance* kebijakan moneter (yang lebih jelas dan tegas) dalam merespon prospek pencapaian sasaran inflasi ke depan. BI Rate digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi pengendalian moneter untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang Operasi Pasar Terbuka (OPT) berada di sekitar BI Rate. Selanjutnya suku bunga SBI 1 bulan diharapkan mempengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan suku bunga jangka yang lebih panjang.

Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dalam RDG triwulanan dan ditetapkan untuk periode satu triwulan ke depan. Penetapan respon kebijakan moneter dilakukan dengan memperhatikan efek tunda (*lag*) kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi. Dalam kondisi yang luar biasa, penetapan respon kebijakan moneter dapat dilakukan dalam RDG bulanan. Adapun dasar pertimbangan penetapan respon kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

- BI Rate merupakan respon bank sentral terhadap tekanan inflasi ke depan agar tetap berada pada sasaran yang telah ditetapkan.

- BI Rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur secara diskresi dengan mempertimbangkan:
 - rekomendasi BI Rate yang dihasilkan oleh fungsi reaksi kebijakan dalam model ekonomi untuk pencapaian sasaran inflasi, dan
 - berbagai informasi lainnya seperti *leading indicators*, survei, informasi anekdotal, variabel informasi, *expert opinion*, asesmen fakta risiko dan ketidakpastian serta hasil-hasil riset ekonomi dan kebijakan moneter.
- Perubahan BI Rate dilakukan terutama jika deviasi proyeksi inflasi terhadap targetnya (*inflation gap*) dipandang telah bersifat permanen dan konsisten dengan informasi dan indikator lainnya.

Kekuatan utama ITF berada pada mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur ekspektasi yang menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan agregat dan inflasi.

2.2. Struktur Perbankan Indonesia

2.2.1. Perkembangan Struktur Perbankan Indonesia

Industri perbankan pada tahun 2009 tetap tumbuh dengan stabilitas terjaga dengan struktur permodalan yang semakin kuat dengan profitabilitas dan likuiditas yang memadai serta kualitas kredit yang terjaga. Sementara itu, jumlah jaringan kantor bank terus meningkat, meskipun jumlah bank berkurang. Namun imbas krisis global masih mengakibatkan pertumbuhan kredit yang melambat, terutama dipengaruhi oleh ekspor yang tumbuh negatif. Secara umum perbankan Indonesia terdiri dari tiga kelompok besar yaitu³:

1. Bank Umum Konvensional
2. Perbankan Syariah
3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Umum Konvensional

³ Laporan Perkembangan Perbankan tahun 2009, Bank Indonesia

Struktur permodalan bank umum konvensional mendekati batas akhir pemenuhan kebijakan modal inti minimum Rp. 100 Miliar pada tanggal 31 Desember 2010 sesuai dengan PBI No. 9/16/PBI/2007 sampai akhir tahun 2009 mayoritas bank atau 90.9% telah mencapai modal inti sebesar Rp. 100 miliar ke atas. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 81.5%. Sumber peningkatan pemenuhan modal minimum ini terutama dari penambahan modal dari pemegang saham lama dan akuisisi oleh investor baru. Adapun selama tahun 2009 tidak terdapat bank yang melakukan merger.

Secara keseluruhan jumlah bank umum pada posisi Desember 2009 adalah sebanyak 121 bank dengan komposisi kepemilikan modal inti sebagai berikut:

1. Bank dengan modal inti > Rp. 10 Trilyun adalah sebanyak 8 bank (6.6%)
2. Bank dengan modal inti Rp. 1 T sampai dengan Rp. 10 T adalah sebanyak 33 bank (27.3%)
3. Bank dengan modal inti Rp. 100 M sampai dengan < Rp. 1 T adalah sebanyak 69 bank (57%)
4. Bank dengan modal inti Rp. 80 M sampai dengan < Rp. 100 M adalah sebanyak 11 bank (9.1%)

Adapun dari sisi kepemilikan aset dan pangsa aset bank, jumlah bank konvensional yang dimiliki oleh Pemerintah dan pihak nasional masih lebih banyak dibandingkan yang dimiliki oleh pihak asing, adapun data pengelompokan bank berdasarkan kepemilikan bank umum pada akhir tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Bank Persero sebanyak 4 bank (3.3%)
2. BUSN Devisa sebanyak 35 bank (28.9%)
3. BUSN Non Devisa sebanyak 30 bank (24.8%)
4. BPD sebanyak 26 bank (21.5%)
5. Campuran sebanyak 16 bank (13.2%)
6. Asing sebanyak 10 bank (8.3%)

Sedangkan dalam hal pangsa aset bank, pihak nasional masih mengungguli kepemilikan aset dari pihak asing, dengan komposisi kepemilikan aset sebagai berikut:

1. Bank milik pemerintah (termasuk bank BUMN dan BPD) memiliki total aset sebanyak 1.180 T dengan pangsa sebanyak 46.6%
2. Bank milik swasta nasional memiliki total aset sebanyak 193 T dengan pangsa sebesar 7.6%
3. Bank milik asing (termasuk kantor cabang bank asing, bank campuran dan bank akuisisi asing memiliki total aset sebanyak 1.161 T dengan pangsa sebesar 45.8%

Perbankan Syariah

Sepanjang tahun 2009, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha syariah bertambah seiring diterbitkannya izin konversi Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), *spinn off* Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), yaitu dari total 121 bank umum, sebanyak 74 bank milik pemerintah dan 47 bank milik swasta nasional.

Bank Perkreditan Kredit

Sampai dengan tahun 2009 pertumbuhan pendirian BPR baru khususnya di luar pulau Jawa dan Bali meningkat karena hal tersebut dengan tujuan Bank Indonesia agar masyarakat kecil di daerah pelosok dapat merasakan manfaat pelayanan BPR. Hal tersebut didukung oleh kebijakan penetapan persyaratan modal disetor yang lebih rendah untuk pendirian BPR di luar wilayah Jawa-Bali dibandingkan pendirian di wilayah Jawa-Bali. Sampai dengan posisi tahun 2009 jumlah BPR sebanyak 1.733 BPR dengan penyebaran yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali yakni sebanyak 1.294 BPR (74.7%)

Langkah merger dan konsolidasi mencapai hasil yang baik dengan berkurangnya sebanyak 39 BPR (2.5%) dari 1.722 (2008) menjadi 1.733 (2009). Selanjutnya dari sisi permodalan juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan meningkatnya porsi BPR yang memiliki modal di atas Rp. 1 M dari 42.1% menjadi 52.7%.

2.3. Penelitian Sebelumnya

2.3.1. Ruby P. Kishan and Timothy P. Opiela (2000)

Ruby P. Kishan and Timothy P. Opiela (2000) melakukan penelitian yang bertujuan untuk membuktikan berjalannya mekanisme *credit channel* dan *bank lending channel* di Amerika Serikat pada tahun 1980 sampai dengan 1995. Penelitian dilakukan dengan mengelompokkan bank menurut jumlah aset yang dimiliki dan tingkat *capital leverage ratio bank*.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit dapat dibedakan menjadi lima jalur Mishkin (2007) yaitu,

a. *Bank Lending Channel*

Jalur ini menekankan pada pengaruh kebijakan moneter terhadap kondisi keuangan bank khususnya dari sisi aset. Dalam jalur ini, selain sisi aset, sisi liabilitas bank juga merupakan komponen penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter. Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraktif, cadangan yang ada di bank akan mengalami penurunan sehingga dana yang dapat dipinjamkan oleh bank akan mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan investasi dan selanjutnya mendorong penurunan output dan juga permintaan agregat.

Bank lending channel merupakan jalur yang cukup dominan karena perbankan memegang peranan yang special dalam sistem keuangan, dimana bank memperoleh dana dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Pada saat bank sentral mengambil kebijakan moneter ekspansif maka hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan dana simpanan yang diperoleh perbankan sehingga hal tersebut akan meningkatkan penawaran kredit bank dan dapat mendorong peningkatan investasi serta pada akhirnya akan mendorong output nasional.

Bank lending channel menjelaskan bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi tingkat penawaran kredit yang diberikan oleh bank melalui pasar yang tidak sempurna. Teori memprediksikan bahwa bank besar atau bank yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi akan mampu mengatasi

permasalahan keterbatasan likuiditas yang timbul sebagai akibat dari kebijakan moneter ketat, hal tersebut karena bank besar memiliki akses yang lebih besar terhadap pasar modal atau mereka dapat menarik dana dari likuiditas yang dimiliki, sedangkan bank kecil yang memiliki aset serta likuiditas yang terbatas harus mengurangi jumlah kredit yang disalurkan sebagai respon terhadap kebijakan moneter ketat yang diambil oleh bank sentral. Sehingga nasabah bank kecil yang tidak memiliki alternatif kredit lain selain kepada bank kecil tersebut akan mengalami kesulitan perolehan kredit karena penurunan penawaran kredit dari bank kecil, hal tersebut akan berdampak pada perekonomian secara umum.

- b. *Balance Sheet Channel*, menekankan pengaruh kebijakan kredit pada kondisi keuangan perusahaan (*borrower*) dan selanjutnya akan mempengaruhi akses perusahaan untuk mendapatkan kredit. Mekanisme transmisi melalui *balance sheet channel* menjelaskan bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi kemampuan peminjaman melalui penurunan nilai aset dan peningkatan kredit. Dalam hal ini, apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter ekspansif, maka suku bunga di pasar akan turun yang mendorong harga saham mengalami peningkatan. Sejalan dengan peningkatan tersebut, nilai bersih perusahaan akan meningkat dan selanjutnya mengurangi tindakan *adverse selection* dan *moral hazard* oleh perusahaan. Kondisi ini mendorong peningkatan pemberian kredit oleh perbankan yang selanjutnya meningkatkan investasi dan output agregat.

c. *Cash Flow Channel*

Mekanisme transmisi melalui jalur cash flow bergerak melalui perbedaan antara uang yang diterima dan uang yang dikeluarkan. Kebijakan moneter ekspansif berupa penurunan suku bunga akan berdampak pada peningkatan neraca perusahaan karena penurunan suku bunga berpengaruh pada peningkatan *cash flow*. Peningkatan *cash flow* akan meningkatkan likuiditas perusahaan serta meningkatkan *payment capacity* dan hal tersebut dapat mengurangi peluang terjadinya permasalahan *adverse selection* dan *moral hazard* sehingga dapat meningkatkan kepercayaan bank untuk memberikan kredit kepada perusahaan.

Suku bunga nominal menjadi hal penting dalam transmisi melalui jalur *cash flow* karena suku bunga nominal mempengaruhi *cash flow* perusahaan. Lebih jauh lagi, suku bunga jangka pendek memiliki peran penting pada jalur ini karena pembayaran bunga dalam jangka pendek akan lebih mempengaruhi *cash flow*.

d. *Unanticipated Price Level Channel*

Transmisi melalui jalur ini bergerak dengan adanya dampak kebijakan moneter terhadap tingkat harga secara umum. Karena di negara-negara industri pada umumnya tingkat suku bunga nominal pada umumnya sudah ditetapkan berdasarkan kontrak, sedangkan perubahan harga secara umum yang tidak dapat diprediksi akan menurunkan kemampuan perusahaan secara riil meskipun tidak menurunkan nilai perusahaan. Kebijakan moneter ekspansif akan meningkatkan terjadinya peningkatan harga secara umum, dimana hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga akan menurunkan risiko terjadinya *adverse selection* dan *moral hazard* dan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kredit, investasi dan output agregat.

Literatur model IS/LM mengasumsikan bahwa bank tidak memiliki peran khusus dalam transmisi kebijakan, sehingga bank hanya berperan sebagai penghubung antara bank sentral dengan nasabah bank. Ketika bank sentral menurunkan *reserve bank* melalui operasi pasar terbuka, hal tersebut akan berdampak pada penurunan *reservable deposit (DD)* yang dimiliki bank. Jika bank tidak meningkatkan tingkat suku bunga simpanan untuk menjaga peningkatan jumlah DD atau *time deposits (TD)*, bank akan menggantikan penurunan DD dengan TD sehingga penawaran kredit yang diberikan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian kebijakan The Fed hanya akan menurunkan DD dan jumlah *money supply*. Penurunan *money penawaran* dan peningkatan suku bunga dapat berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, sedangkan penurunan jumlah kredit lebih disebabkan oleh pelemahan kegiatan ekonomi. Jalur ini dikenal dengan jalur suku bunga atau jalur uang.

Pada *Bank Lending Channel (BLC)*, peningkatan suku bunga oleh bank sentral dapat berdampak pada penurunan jumlah simpanan yang diperoleh bank sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan penawaran kredit dari

bank. Dengan demikian operasi pasar terbuka yang dilakukan bank sentral akan berdampak langsung terhadap penawaran kredit yang diberikan bank.

Penelitian transmisi kebijakan moneter melalui BLC membagi bank ke dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik neraca bank karena hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan bank dalam menyediakan kredit. Kayshan dan Stein (1995) mengelompokkan bank berdasarkan jumlah aset, dan menemukan bahwa bank yang memiliki dengan kategori jumlah aset terkecil adalah bank yang paling responsif terhadap perubahan kebijakan moneter. Kemudian Kayshan dan Stein (1997) melakukan penelitian kembali dengan mengelompokkan bank berdasarkan jumlah aset dan tingkat likuiditasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank pada kategori aset terkecil dan paling tidak likuid memiliki respon yang paling tinggi atas perubahan kebijakan moneter oleh bank sentral.

Dalam penelitian ini, untuk memberikan bukti yang lebih jauh mengenai BLC maka Kishan dan Opiela (2000) menambahkan faktor pembeda tambahan diluar jumlah aset bank yaitu *bank capital leverage ratio*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal merupakan faktor yang penting dalam menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan kredit.

Dalam melaksanakan pengelolaan dananya bank harus melakukan manajemen sebagai berikut:

1. Manajemen Likuiditas

Kegiatan manajemen likuiditas sangat berkaitan dengan tingkat cadangan bank, karena cadangan merupakan jenis aset yang akan digunakan bank untuk memenuhi kewajiban likuiditas bank terhadap deposannya. Sebuah bank yang memiliki cadangan yang besar, tidak harus mengubah unsur aset lainnya dari neraca bank pada saat terjadi penarikan dana deposan karena kewajiban likuiditas bank sudah dapat dipenuhi dengan adanya cadangan bank. Sedangkan bank yang memiliki tingkat cadangan yang rendah memerlukan sumber dana lainnya diluar cadangan tersebut pada saat terjadinya penarikan dana oleh deposan sehingga akan mengubah struktur neraca bank, sumber-sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk menutupi kebutuhan likuiditasnya antara lain adalah pinjaman dari bank lain, penjualan surat

berharga, pinjaman dari bank sentral, atau mengurangi jumlah pemberian kredit. Namun seluruh pilihan sumber dana dimaksud akan menimbulkan biaya-biaya tambahan bagi bank, antara lain berupa biaya bunga pinjaman dan biaya transaksi atas penjualan surat berharga. Dengan demikian, bank cenderung memegang kelebihan cadangan karena kelebihan cadangan merupakan asuransi terhadap biaya yang timbul sebagai akibat adanya penarikan dana oleh deposan.

2. Manajemen Aset

Manajemen aset dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan cara mencari kemungkinan imbal hasil tertinggi atas kredit dan surat berharga yang dimiliki, mengurangi risiko, dan mencukupi kebutuhan likuiditas dengan memiliki aset likuid yang memadai. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun produk kredit yang menarik bagi calon debitur serta dapat memberikan imbal balik yang maksimal dengan tingkat risiko gagal bayar yang rendah. Selain hal tersebut diperlukan kemampuan analisis kredit yang maksimal dalam pengambilan keputusan pemberian kredit sehingga mengurangi risiko terjadinya *adverse selection*
2. Pemilihan bentuk investasi dengan cara pembelian surat berharga yang memberikan imbal hasil yang tinggi namun memiliki risiko yang terukur.
3. Melakukan diversifikasi aset untuk meminimalkan risiko.
4. Mengelola likuiditas aset dengan menentukan jumlah cadangan yang tepat serta melakukan pemilihan aset likuid dalam jumlah yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan likuiditas bank pada saat terjadi penarikan dana oleh deposan. Bank harus mampu menyeimbangkan antara faktor likuiditas dan peningkatan pendapatan dari aset yang dimiliki sehingga keuntungan optimal dapat diperoleh tanpa mengabaikan unsur likuiditas bank.

3. Manajemen Sumber Dana Bank

Sumber dana bank merupakan uang tunai serta berbagai jenis aktiva lancar lainnya yang dikuasai atau dimiliki oleh bank yang setiap saat dapat

diuangkan dan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban bank. Sumber dana bank dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Dana pihak kesatu

Merupakan dana yang berasal dari penyeteroran modal oleh pemegang saham bank, dalam kelompok ini termasuk sumber dana modal dari pemegang saham pendiri, pemegang saham yang datang dan bergabung kemudian sebagai pemegang saham bank serta dari pemegang saham masyarakat ketika bank *go public*.

2. Dana pihak kedua

Merupakan dana yang berasal dari pinjaman pihak di luar bank yang meliputi;

- *Call money*, yaitu pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank yang memiliki jangka waktu sangat singkat. *Call money* yang berjangka waktu satu malam saja disebut *overnight call money*;
- Pinjaman antar bank, merupakan pinjaman dari bank lain melalui PUAB (Pasar Uang Antar Bank) yang merupakan pinjaman yang berjangka waktu pendek;
- Pinjaman dari bank lain yang berkaitan dengan pinjaman bersama terhadap sesuatu pembiayaan proyek tertentu yang berjangka waktu menengah atau panjang, sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak.
- Pinjaman dari bank sentral, berupa kredit likuiditas dengan agunan berupa tagihan lancar dengan tingkat risiko yang rendah, antara lain berupa Sertifikat Bank Indonesia.

3. Dana pihak ketiga

Merupakan dana yang berasal dari pinjaman dana masyarakat berupa giro, deposito, tabungan dan sebagainya. Dana pihak ketiga ini dianggap berasal dari surplus unit yang menyerahkan kelebihan dana-dananya itu sebagai unsur pendanaan bagi bank. Karena selanjutnya dana-dana dari surplus unit tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian pinjaman kepada unit yang defisit, oleh karena itu bank dinilai

memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi atas dana-dana masyarakat tersebut.

Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh manajemen bank dalam melakukan alokasi dana, yaitu:

1. *Pool of Fund Approach*

Pendekatan yang menggunakan semua sumber dana yang dihimpun oleh bank digabung menjadi satu kemudian dialokasikan tanpa memperhatikan jenis dana, sifat sumber dana, jangka waktu penempatan dana serta biaya dana. Dana-dana tersebut dialokasikan dalam berbagai bentuk penempatan dana berdasarkan prioritas dan strategi penggunaan dana bank.

2. *Aset Allocation Approach*

Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing sumber dana memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga harus diperlakukan secara individual sesuai karakteristik dana tersebut.

Kemudian alokasi dana dibagi berdasarkan prioritas penggunaan dana dan berdasarkan sifat aktiva sebagai berikut:

1. Berdasarkan prioritas penggunaan dana maka alokasi dana dikelompokan sebagai berikut:

a. Cadangan Primer

Merupakan alokasi dana dalam yang ditujukan untuk memenuhi likuiditas minimum dan keperluan operasional bank. Bentuk dari cadangan primer ini adalah uang kas, saldo rekening pada bank sentral dan bank-bank lain;

b. Cadangan Sekunder

Merupakan alokasi dana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya kurang dari satu tahun sekaligus untuk memperoleh margin keuntungan, seperti dalam bentuk penempatan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito, dan *Commercial Papers*

c. Penyaluran Kredit

Merupakan alokasi dana yang menjadi bisnis utama dari bank untuk memperoleh sumber pendapatan bagi bank baik berupa pemberian kredit jangka pendek, menengah maupun kredit jangka panjang. Portfolio kredit ini merupakan aktiva produktif paling utama bagi bank umum

d. Investasi

Merupakan prioritas alokasi dana yang terakhir bagi bank, investasi dapat dilakukan dalam bentuk penanaman pada surat berharga jangka panjang atau pada surat berharga yang memiliki likuiditas lebih tinggi. Investasi ini bertujuan untuk memperoleh tambahan pendapatan bagi bank dengan cara membeli saham, obligasi, serta surat berharga lainnya.

2. Berdasarkan sifat aktiva maka alokasi dana dikelompokan sebagai berikut:
 - a. Aktiva tidak produktif, yaitu alat-alat likuid berupa kas, giro pada bank lain, dan warkat dalam proses penagihan, serta aktiva tetap dan inventaris kantor
 - b. Aktiva Produktif, merupakan aktiva dalam bentuk kredit berjangka pendek, menengah dan panjang serta penempatan pada bank lain, surat-surat berharga serta penyertaan modal dalam bentuk saham secara langsung pada bank lain atau lembaga keuangan lain.

4. Manajemen Kecukupan Modal

Bank harus memiliki kemampuan dalam menentukan jumlah modal yang harus dimiliki karena beberapa faktor sebagai berikut:

1. Modal bank membantu mencegah kegagalan bank, yaitu suatu situasi dimana bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada deposan dan kreditor lainnya. Dengan memiliki modal dalam jumlah yang memadai maka hal tersebut akan mengurangi risiko bank menjadi insolven bahkan pada saat bank mengalami kerugian.
2. Jumlah modal mempengaruhi imbal hasil bagi pemilik (pemegang saham) bank
3. Otoritas perbankan / badan pengatu mewajibkan bank memiliki jumlah minimum modal bank (kewajiban modal bank)

Untuk menjelaskan perbedaan respon antar kelompok bank maka digunakan model yang menggambarkan kondisi bank yang memiliki komponen utama yaitu kredit dan simpanan, dimana kedua komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah modal dan aset yang dimiliki bank. Jika diasumsikan bank memiliki aset terdiri dari; *required reserve (RR)*, *securities (SEC)*, dan *loan (LN)*; serta kewajiban yang terdiri dari; *demand deposit (DD)*, *large time deposit (TD)*, dan *capital (K)*, sehingga persamaan untuk neraca bank adalah:

$$RR + SEC + LN = DD + TD + K \dots\dots\dots (2.1)$$

DD diasumsikan berhubungan terbalik dengan tingkat suku bunga pasar (misalnya, Fed Fund Rate (r_{ff})). Bank diasumsikan memiliki *market power* pada pasar TD sehingga dapat meningkatkan jumlah TD dengan meningkatkan tingkat suku bunganya (r_{TD}) diatas tingkat suku bunga simpanan rata-rata (r_{TD}), sehingga:

$$DD = a_0 - (a_1) r_{ff} \dots\dots\dots (2.2)$$

$$TD = b_0 + (b_1)(r_{TD} - r_{TD}) \dots\dots\dots (2.3)$$

Bank menyimpan sebagian dari DD dalam *required reserve (RR)*, tetapi bank tidak memiliki kelebihan cadangan. Untuk menjelaskan motif bank dalam menyimpan sekuritas sebagai cadangan, maka SEC merupakan proporsi yang tetap dari DD. Pasar kredit diasumsikan tidak kompetitif sehingga bank dapat meningkatkan atau menurunkan jumlah kredit dengan cara menggerakkan tingkat suku bunga kredit di atas atau di bawah suku bunga kredit rata-rata. Adapun suku bunga rata-rata yang terdiri dari r_{TD} , r_{SEC} dan r_{LN} diasumsikan dipengaruhi oleh *fed fund rates*. Sehingga terdapat hubungan antara *fed funds rates*, TD, SEC, dan LN yang dapat dijelaskan pada persamaan:

$$\Delta LN_{it} = \beta_1 + \beta_2 \sum \Delta FFRate_t + \beta_3 \Delta SEC_{it} + \beta_4 \Delta TD_{it} + u_{it} \dots\dots\dots (2.4)$$

Dimana ΔLN_{it} adalah pertumbuhan kredit yang diberikan oleh kelompok bank $\Delta FFRate_t$ adalah perubahan suku bunga Fed Fund pada periode t, ΔSEC_{it} adalah perubahan jumlah sekuritas yang dimiliki kelompok bank i pada periode t, dan ΔTD_{it} adalah perubahan jumlah *Large Time Deposit* yang dimiliki kelompok bank i pada periode t.

Data yang digunakan adalah data neraca kuartalan bank periode 1980:1 sampai dengan 1995:4 terdiri dari 13042 bank komersial yang diperoleh dari *Report of Condition and Income* yang dikirim oleh bank kepada *Federal Reserve*.

Untuk menganalisa perbedaan dampak pada kelompok bank menurut jumlah kepemilikan aset maka bank dibagi dalam 6 (enam) kelompok ($< \$ 50$ million, $\$50 - 100$ million, $\$100 - 300$ million, $\$ 300 - 500$ million, $\$ 500 - \3 billion, over $\$3$ billion) yang kemudian dibagi lagi berdasarkan kelompok *capital leverage ratio* menjadi 3 (tiga kelompok ($<8\%$ / *undercapitalized*, $\geq 8\%$ dan $<10\%$ / *adequately capitalized*, $\geq 10\%$ / *well capitalized*).

Untuk mengetahui perbedaan respon dari masing-masing kelompok, maka persamaan tersebut diestimasi berdasarkan kelompok jumlah aset yang dimiliki bank dan berdasarkan *capital leverage ratio*. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa modal merupakan hal yang terpenting dalam menganalisa dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan kredit karena permodalan bank sangat penting bagi bank dalam menghadapi risiko yang dihadapi bank. Hal tersebut juga akan berdampak pada komposisi portfolio aset yang dimiliki bank, selain itu peranan permodalan dalam mengatasi dampak *shock* juga dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesehatan bank dan indikator tingkat kemampuan bank dalam meningkatkan sumber pendanaan pada saat adanya kebijakan moneter ketat.

Lebih jauh penelitian dilakukan dengan menganalisis dampak perubahan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan kredit berdasarkan jenis kredit yang disalurkan (*Commercial and Industrial credit, Real Estates Loans dan Consumer Loans*) yang memberikan kesimpulan bahwa kelompok bank yang memiliki jumlah aset terkecil bersifat lebih responsif terhadap perubahan kebijakan moneter. Hal tersebut jika dihubungkan dengan jenis kredit yang diberikan dimana porsi kredit C&I terbesar dimiliki oleh kelompok bank besar maka dapat disimpulkan bahwa kredit C&I lebih tidak responsif dibandingkan jenis kredit lainnya yang porsinya lebih besar yang dimiliki oleh bank-bank kecil.

Penggunaan unsur modal sebagai indikator dari kekuatan transmisi kebijakan moneter melalui bank memiliki beberapa implikasi bagi *distributional effect* dari kebijakan dan bagi koordinasi antara kebijakan pengaturan dan stabilisasi. Hasil penelitian Kishan and Opiela tahun 2000 menunjukkan bahwa bank dengan permodalan yang kecil adalah kelompok bank yang paling terpengaruh oleh perubahan kebijakan moneter ketat dari bank sentral, sehingga

bank kecil cenderung akan menurunkan kreditnya pada saat terjadi kebijakan moneter ketat. Hal tersebut selain karena keterbatasan likuiditas dan sumber pendanaan pada bank kecil juga karena rendahnya efisiensi pada bank kecil sehingga menimbulkan biaya yang tinggi pada operasional bank kecil.

2.3.2 Phillip Engler dan Terhi Jokipii (2007)

Phillip Engler dan Terhi Jokipii meneliti peranan regulasi permodalan bagi transmisi kebijakan moneter. Penelitian dilakukan terhadap perbankan di Austria pada periode tahun 1997 sampai dengan 2003. Penelitian sebelumnya yang pada umumnya lebih fokus terhadap jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga yang berjalan melalui dampaknya terhadap perusahaan dan rumah tangga, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peranan bank dalam mendukung berjalannya transmisi kebijakan moneter khususnya melalui jalur suku bunga. Studi ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana *excess capital* yang dimiliki bank dapat mempengaruhi keputusan pemberian kredit bank dan dampaknya terhadap transmisi kebijakan moneter dari bank sentral terhadap perekonomian di Austria.

Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan suku bunga. Dalam hal ini, pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan kepada suku bunga jangka menengah/panjang melalui mekanisme penyeimbangan sisi penawaran dan permintaan uang. Perkembangan suku bunga ini akan mempengaruhi *cost of capital* yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi yang merupakan komponen dari pengeluaran agregat.

Fokus utama jalur tingkat suku bunga adalah pada perubahan suku bunga jangka pendek yang merupakan instrument yang secara penuh bisa dikendalikan oleh otoritas moneter. Sinyal perubahan pada *short term interest rate instrument* yang akan diteruskan pada suku bunga jangka panjangnya yang memiliki relevansi dengan intervensi atau aktivasi penempatan kekayaan dengan maksud memaksimalkan hasil

Perubahan suku bunga akan menimbulkan dampak pada *cost of borrowing* dan *cash flow*, kemudian perubahan ini juga akan merubah nilai marginal biaya peminjaman (*marginal cost of borrowing*), mengubah investasi, tingkat tabungan dan akhirnya permintaan agregat turut berubah. Dampak pada *cash flow* akan terjadi, pada saat suku bunga berubah, ini berarti merubah pula pola perilaku *cash flow* pada *borrowers* dan *lenders*. Jadi terdapat dampak *marginal* dan *average* dari perubahan tingkat suku bunga. Sedangkan untuk memperjelas efek yang ditimbulkan di antara keduanya, diperlukan adanya penekanan pada konsep tingkat suku bunga nominal dan riil. Tingkat suku bunga riil mempengaruhi *cost of borrowing* yang akhirnya menentukan keputusan untuk melakukan aktivitas saving atau spending. Akan tetapi kenaikan suku bunga nominal sama sekali tidak memberikan dampak pada nilai *marginal* dari aktivitas *borrowing*. Kondisi ini mencerminkan adanya ekspektasi inflasi yang terus meninggi dan kemudian akan mengubah *cash flow* dan *balance sheet* dari *borrower* seiring dengan perubahan tingkat suku bunga nominal. Permintaan agregat secara otomatis akan berubah dalam *sequence* semacam ini.

Frederick S. Mishkin dalam buku "The Economics of Money, Banking, and Financial Market - Eight Edition tahun 2007 menjelaskan bahwa hal penting dari jalur suku bunga adalah perluasannya pada tingkat suku bunga riil (dibanding hanya melihat suku bunga nominal) yang akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan belanja pengeluaran. Hal utama yang dapat menjawab bagaimana perubahan suku bunga nominal jangka pendek yang diciptakan oleh bank sentral akan mempengaruhi perubahan suku bunga riil jangka pendek dan jangka panjang adalah adanya *sticky price*, yang menjelaskan bahwa respon perubahan level harga agregat bergerak sangat lambat dari waktu ke waktu. Hal tersebut berarti bahwa kebijakan moneter ekspansif yang menjadikan penurunan suku bunga nominal jangka pendek, juga akan berdampak pada penurunan suku bunga riil jangka pendek. Penurunan suku bunga tersebut akan mengakibatkan peningkatan pada investasi yang pada akhirnya akan menciptakan peningkatan pada output agregat.

Kondisi dimana suku bunga riil akan lebih berpengaruh terhadap pengeluaran dibandingkan dengan suku bunga nominal, melahirkan mekanisme

yang menjelaskan bagaimana kebijakan moneter dapat memicu pertumbuhan ekonomi, bahkan meskipun pada saat tingkat suku bunga nominal mencapai titik nol pada saat terjadi deflasi. Pada saat tingkat suku bunga nominal mencapai titik nol, komitmen terhadap pengambilan keputusan kebijakan moneter ekspansif pada periode selanjutnya akan meningkatkan *expected price level* ($Pe \uparrow$) dan *expected inflation* ($\pi e \uparrow$), sehingga yang selanjutnya akan berdampak pada penurunan suku bunga riil ($ir = [i - \pi e] \downarrow$, bahkan pada saat tingkat suku bunga nominal pada angka nol, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pengeluaran agregat melalui jalur suku bunga sebagai berikut:

$$\text{Expansionary monetary policy} \rightarrow Pe \uparrow \rightarrow \pi e \uparrow \rightarrow ir \downarrow \rightarrow I \uparrow \rightarrow Y \uparrow$$

Data yang digunakan dalam penelitian Phillip Engler dan Terhi Jokipii adalah data neraca kuartal bank dari kuartal pertama tahun 1997 sampai dengan kuartal ke empat tahun 2003 dari 894 bank di Austria. Data diperoleh dari *Oesterreichische Nationalbank (OeNB)* yang mengumpulkan statistik data dari seluruh perbankan di Austria. Persamaan yang digunakan untuk penelitian adalah:

$$\begin{aligned} \Delta \ln L_{it} = & \sum_{j=1}^8 \alpha_j \Delta \ln L_{it-j} + \sum_{j=0}^3 \beta_j \Delta MP_{t-j} + \sum_{j=0}^3 \phi_j \Delta \ln REER_{t-j} + \sum_{j=0}^3 \delta_j \Delta \ln y_{t-j} + \lambda X_{it-1} \\ & + \sum_{j=1}^3 \gamma_j X_{it-1} \Delta MP_{t-j} + \sum_{j=1}^3 \eta_j X_{it-1} \Delta \ln REER_{t-j} + \sum_{j=1}^3 \tau_j X_{it-1} \Delta \ln y_{t-j} \\ & + \sum_{j=1}^3 \sigma_j SD_j + \sum_j \kappa_j D_j + \vartheta \ln A_{it} + \rho Liq_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (1)$$

Keterangan:

- $\Delta \ln L_{it}$ adalah perubahan kredit pada bank i pada tahun ke t
- ΔMP adalah perubahan suku bunga pasar uang tiga bulan (EURIBOR) sebagai indikator kebijakan moneter
- $\Delta REER$ adalah perubahan nilai tukar
- SD adalah variabel seasonal dummy
- D adalah variabel dummy
- X_{it} adalah modal minimal actual dikurangi modal minimal wajib pada bank i periode ke t

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank yang memiliki modal yang besar dan bank yang memiliki modal yang rendah memberikan reaksi yang berbeda atas

perubahan kebijakan moneter. Bank yang memiliki modal besar akan melakukan ekspansi kredit pada saat terjadi kenaikan suku bunga, sedangkan bank yang memiliki modal rendah akan melakukan pengurangan kredit pada saat terjadi peningkatan suku bunga. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh bank-bank kecil.

Penelitian juga menunjukkan hasil bahwa kenaikan GDP akan berdampak pada peningkatan maka kredit sehingga hubungan antara pertumbuhan GDP dengan *excess capital* menggambarkan bahwa bank yang memiliki modal yang rendah akan melakukan kebijakan yang lebih *procyclical* daripada bank yang memiliki modal yang tinggi. Adapun untuk variabel REER diperoleh kesimpulan bahwa nilai tukar tidak memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit di perbankan Austria.

Secara keseluruhan penelitian menunjukkan bahwa bank yang memiliki modal yang kecil memberikan reaksi yang bersifat *procyclical* terhadap kebijakan moneter dimana pada saat terjadi kebijakan moneter ketat maka bank akan melakukan kebijakan kredit yang lebih *restrictive*, hal ini sejalan dengan teori transmisi kebijakan moneter melalui bank lending channel.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana pengaruh perubahan kebijakan moneter terhadap jumlah kredit yang diberikan oleh bank pada beberapa kelompok bank berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Analisa terhadap data yang dikumpulkan dilakukan secara statistik, secara ekonometrik dan secara ekonomi. Analisis secara statistik dibatasi hanya secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi masing-masing variabel dalam jangka waktu penelitian. Sedangkan analisis model dilakukan dengan menggunakan teori ekonometrik. Untuk melihat dan menganalisis hubungan-hubungan variabel digunakan teori-teori ekonomi yang relevan.

3.1 Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dari Bank Indonesia. Data yang digunakan adalah panel data bulanan yang disampaikan kepada Bank Indonesia untuk periode tahun Juli 2005 sampai dengan September 2009.

Untuk menganalisa perbedaan respon bank terhadap perubahan kebijakan moneter, yang dikarenakan perbedaan jumlah aset yang dimiliki bank, maka penulis mengelompokan bank berdasarkan jumlah aset yang dimiliki sebagai berikut:

- Bank dengan jumlah aset < Rp. 1 Trilyun
- Bank dengan jumlah aset Rp. 1 Trilyun sampai dengan Rp. 10 Trilyun

- Bank dengan jumlah aset Rp. 10 Trilyun sampai dengan 50 Trilyun
- Bank dengan jumlah aset > Rp. 50 Trilyun

3.2 Kerangka Model

Kerangka transmisi kebijakan moneter yang menjadi dasar pada penelitian ini adalah transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit bank (*bank lending channel*). Pertimbangan pemilihan jalur tersebut adalah karena sampai saat ini kredit merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi perekonomian Indonesia, sehingga berjalannya fungsi intermediasi perbankan akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selanjutnya melihat kondisi struktur perbankan Indonesia yang terdiri dari beberapa kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset berbeda-beda yang memungkinkan terjadinya perbedaan respon terhadap perubahan kebijakan moneter yang dikeluarkan bank sentral. Dalam studi ini perubahan respon bank dijelaskan dengan perubahan jumlah kredit yang diberikan, sedangkan perubahan kebijakan moneter dijelaskan dengan perubahan BI rate sebagai indikator arah kebijakan moneter. Selain hal tersebut studi ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian Ruby P. Kishan and Timothy P. Opiela (2000) yang memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan respon yang diberikan oleh beberapa kelompok bank dengan kepemilikan jumlah aset yang berbeda atas perubahan kebijakan moneter di Austria, maka penulis tertarik untuk melakukan studi atas hal tersebut di Indonesia.

Model persamaan akan mengikuti model yang dikembangkan oleh Ruby P. Kishan dan Timothy P. Opiela (2000). Secara sederhana, model Kishan dan Opiela dapat diuraikan dalam persamaan linear sebagai berikut: Untuk menguji perbedaan respon bank berdasarkan kelompok jumlah kepemilikan bank terhadap kebijakan moneter, digunakan model sebagai berikut:

$$\Delta LN_{it} = \beta_1 + \beta_2 \sum \Delta FFRate_t + \beta_3 \Delta SEC_{it} + \beta_4 \Delta LTD_{it} + u_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana ΔLN_{it} adalah pertumbuhan kredit yang diberikan oleh kelompok bank $\Delta FFRate_t$ adalah perubahan *fed fund rate* pada periode t, ΔSEC_{it} adalah perubahan jumlah yang dimiliki kelompok bank i pada periode t, dan ΔLTD_{it} adalah perubahan jumlah *Large Time Deposit* yang dimiliki kelompok bank i

pada periode t. Selanjutnya atas dasar data indikator kebijakan moneter dan data perbankan Indonesia, maka digunakan model sebagai berikut:

$$KYD_{it} = \beta_1 + \beta_2 BIR_t + \beta_3 DPK_{it} + \beta_4 SBH_{it} + u_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan:

- KYD_{it} = Jumlah kredit yang diberikan pada kelompok bank i periode ke-t
- BIR_t = BI Rate pada periode ke-t
- DPK_{it} = Jumlah Dana Pihak Ketiga pada kelompok bank i periode ke-t
- SBH_{it} = Jumlah Surat Berharga yang dimiliki oleh kelompok bank i periode ke-t

Untuk mengetahui pertumbuhan kredit pada kelompok bank i periode bulan t sebagai variabel terikat, kami menggunakan seri data yang terdiri dari data kredit bank yang dikelompokkan atas jumlah kepemilikan aset bank. Selanjutnya sejalan dengan teori mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui *bank lending channel* yang menjelaskan bahwa perubahan suku bunga bank sentral akan mempengaruhi pertumbuhan kredit maka kami menggunakan BI Rate sebagai variabel bebas yang akan menjelaskan dampak perubahan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan kredit bank yang dikelompokkan berdasarkan jumlah kepemilikan aset bank. Kemudian untuk melihat dampak perubahan variabel internal bank, kami menggunakan variabel DPK sebagai faktor sumber dana bank serta variabel SBH sebagai unsur alternative penempatan dana bank. Adapun untuk pengelompokan kepemilikan bank kami hanya melakukan analisis pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset sebagai berikut :

- Bank dengan jumlah aset < Rp. 1 Trilyun
- Bank dengan jumlah aset Rp. 1 Trilyun sampai dengan Rp. 10 Trilyun
- Bank dengan jumlah aset Rp. 10 Trilyun sampai dengan 50
- Bank dengan jumlah aset > Rp. 50 Trilyun

3.3. Metodologi Ekonometri

3.3.1 Model Estimasi Regresi Linier

Metode ekonometrik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah model estimasi regresi linier. Regresi merupakan metode estimasi utama dalam ekonometrika. Dalam analisis regresi, suatu persamaan regresi dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel-variabel. Setelah analisis membentuk persamaan regresi, kemudian persamaan tersebut membuat pendugaan nilai suatu variabel, jika nilai variabel lainnya diketahui. Variabel yang akan diduga dinamakan variabel terikat (*terikat variabel*) dan variabel yang menerangkan perubahan variabel terikat dinamakan variabel bebas (*bebas variabel*). (Sri Mulyono:1990)

Metode estimasi parameter (koefisien) regresi yang biasa digunakan adalah metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*). Metode ini berusaha untuk meminimumkan simpangan kuadrat antara nilai sebenarnya (Y) terhadap nilai dugaan (\hat{Y}) dari variabel terikat atau dengan kata lain meminimumkan error kuadrat [$\sum \xi_i^2 = (Y_i - \hat{Y}_i)^2$]. Penaksiran koefisien-koefisien regresi dari suatu model regresi linier dengan menggunakan metode OLS akan menghasilkan penaksir yang bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimate*) sesuai dengan teorema *Gauss-Markov*. Untuk menghasilkan penaksir yang bersifat BLUE, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi (Gujarati; 2003) :

- a. ξ_i adalah variabel random yang memiliki distribusi Normal($0, \sigma^2$).
- b. $E(\xi_i | X_i) = 0$, untuk setiap i .

Error yang positif dapat saling menghapuskan dengan error yang negatif, sehingga rata-rata kesalahan peramalan adalah sama dengan nol.

- c. Tidak ada kesalahan dalam spesifikasi model.

Untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan dalam spesifikasi model bisa menggunakan *Wstate's general heteroscedastisity test with cross term*. Variabel bebas adalah fixed.

- d. $\text{Var}(\xi_i | X_i) = \sigma^2$;

Artinya varian ξ_i konstan di dalam setiap periode (tidak ada masalah heteroskedastisitas atau disebut homoskedastisitas).

- e. $\text{Cov}(\xi_i, \xi_j) = 0$, untuk setiap $i \neq j$.
Artinya error peramalan ke-i tidak berkorelasi dengan error peramalan ke-j (tidak ada masalah autokorelasi).
- f. $\text{Cov}(\xi_i, X_i) = 0$
Error peramalan tidak berkorelasi dengan variabel X_i . Jika asumsi rata-rata kesalahan peramalan sama dengan nol terpenuhi maka asumsi ini terpenuhi.
- g. Tidak ada masalah multikolinieritas
Artinya tidak ada hubungan/korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas dalam model.

3.3.2 Uji Hipotesa

Parameter-parameter hasil estimasi dengan metode OLS kemudian diuji secara statistik untuk menguji apakah hipotesa bisa diterima atau tidak. Uji hipotesa adalah suatu anggapan atau pendapat yang diterima secara kuantitatif untuk mengolah suatu fakta untuk penelitian. Pengujian dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya model melalui uji kesesuaian model (R^2), uji secara serempak (F test) maupun uji secara parsial (t test), untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesa nol.

3.3.2.1 Uji Kesesuaian (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengukur kebaikan atau kesesuaian suatu model persamaan regresi, lebih dari dua variabel. Koefisien determinasi majemuk R^2 memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X secara bersama-sama. Besaran R^2 terletak antara 0 dan 1, jika $R^2 = 1$ berarti bahwa semua variasi data variabel t yang digunakan dalam model regresi, sebesar 100%. Jika $R^2 = 0$ berarti tidak ada variasi dalam variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X. Model dikatakan baik jika R^2 mendekati 1.

Hal yang perlu diperhatikan dari sifat R^2 adalah sangat dipengaruhi oleh banyaknya variabel bebas. Semakin banyak variabel bebas dimasukkan ke dalam model, maka nilai R^2 akan semakin tinggi. Hal ini tentunya akan sangat menyesatkan, oleh karena itu harus ada faktor koreksi untuk mengantisipasi

bertambahnya variabel bebas. Dengan demikian untuk kasus regresi linier berganda sebaiknya digunakan *Adjusted-R²*. Koefisien ini sudah dihilangkan pengaruh derajat bebasnya, sehingga benar-benar menunjukkan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Nilai *Adjusted-R²* dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$R^2 - adj = 1 - (1 - R^2) \frac{n-1}{n-k-1} \dots \dots \dots (3.3)$$

3.3.2.2 Uji Signifikansi Model (Uji Fisher / F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara keseluruhan (model) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tak bebas. Tahapan uji F adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan hipotesis.

$H_0: \beta_1 = \beta_2 \dots \beta_k = 0$, artinya secara overall tidak ada pengaruh yang signifikan

dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas.

$H_1: \beta_i \neq 0$, artinya minimal ada satu variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tak bebas.

- b. Menentukan tingkat signifikansi pengujian (α).
c. Mencari nilai F-statistics dengan formula sebagai berikut :

$$F - hit = \frac{\frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{k}}{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-k-1}} = \frac{R^2}{\frac{1-R^2}{n-k-1}} \dots \dots \dots (3.4)$$

Dimana,

$$SSR = \sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 = \text{jumlah kuadrat regresi}$$

$$SSE = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \text{jumlah kuadrat error peramalan}$$

$$SST = SSR + SSE = \sum (Y_i - \bar{Y})^2 = \text{jumlah kuadrat total}$$

k adalah banyaknya variabel bebas

n adalah banyaknya observasi.

- d. Membandingkan nilai F-statistics dengan F-tabel berderajat bebas (α , k, n-k-1). Jika $F\text{-stat} \leq F_{(\alpha, k, n-k-1)}$, berarti terima H_0 , dan jika $F\text{-stat} > F_{(\alpha, k, n-k-1)}$, berarti tolak H_0

Atau pengujian juga bisa dilakukan dengan membandingkan nilai Prob (F-stat) dengan α . Jika $Prob(F\text{-stat}) \geq \alpha$ berarti terima H_0 , dan jika $Prob(F\text{-stat}) < \alpha$ berarti tolak H_0

3.3.2.3 Uji Secara Parsial (Uji T)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tak bebas. Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan hipotesis

$H_0 : \beta_i = 0$, menyatakan koefisien regresi parameter populasi tidak berbeda nyata (*not significant*) dari nol.

$H_1 : \beta_i \neq 0$, menyatakan koefisien regresi parameter populasi berbeda nyata (*significant*) dari nol.

- b. Menentukan tingkat signifikansi pengujian (α).

- c. Mencari nilai t-statistics dengan formula sebagai berikut :

$$t\text{-hit} = \frac{\hat{\beta} - \beta}{\sigma_{\hat{\beta}}}, \quad \sigma_{\hat{\beta}_0} = \sqrt{\sigma_e^2 * \left\{ \frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}} \right\}}$$

$$\sigma_{\hat{\beta}_i} = \sqrt{\frac{\sigma_e^2}{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}}}$$

$$\sigma_e^2 = \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-k-1} = \frac{\sum Y^2 - \hat{\beta}_0 \sum Y - \hat{\beta}_1 \sum XY}{n-k-1} \dots \dots \dots (3.5)$$

dimana k adalah banyaknya variabel bebas dan n adalah banyaknya observasi.

- d. Membandingkan nilai t-statistics dengan t-tabel berderajat bebas ($\alpha/2, n-k-1$). Jika $|t\text{-stat}| \leq t_{(\alpha/2, n-k-1)}$, berarti terima H_0 dan jika $|t\text{-stat}| > t_{(\alpha/2, n-k-1)}$, berarti tolak H_0

Pengujian juga bisa dilakukan dengan membandingkan nilai Prob (t-stat) dengan nilai α . Jika $\text{Prob (t-stat)} \geq \alpha$ berarti terima H_0 dan jika $\text{Prob (t-stat)} < \alpha$ berarti tolak H_0 .

3.3.3 Uji Asumsi OLS

Sebagai upaya untuk menghasilkan model yang efisien, visible dan konsisten, maka perlu pendeteksian terhadap pelanggaran asumsi model yaitu gangguan antar waktu (*time-related disturbance*), gangguan antar individu (*cross section disturbance*), dan gangguan akibat keduanya.

3.3.3.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas muncul jika diantara variabel bebas memiliki korelasi yang tinggi, sehingga sulit memisahkan efek satu variabel bebas terhadap variabel terikat dari efek variabel bebas lainnya.

Indikasi-indikasi terjadinya multikolinieritas menurut Gujarati (2003) :

1. Jika ditemukan nilai R^2 yang tinggi dan nilai statistik F yang signifikan tetapi sebagian besar nilai statistik t tidak signifikan
2. Korelasi sederhana yang relatif tinggi (0,8 atau lebih) antara satu atau lebih pasang variabel bebas. Jika koefisien kurang dari 0.8 berarti masalah tidak terlalu serius, belum terjadi multikolinieritas
3. Regresi bantuan (*auxiliary regression*), dengan cara meregresi masing-masing peubah bebas pada peubah lainnya. Apabila nilai R^2 tinggi maka ada indikasi ketergantungan linier yang hamper pasti diantara variabel-variabel bebas.

Pemecahan masalah multikolinieritas adalah :

- a. Tidak perlu dilakukan perbaikan jika seluruh hasil pengujian signifikan
- b. Mengeluarkan variabel bebas yang menyebabkan multikolinieritas,
- c. Menggabungkan data cross-section dengan data time series karena semakin banyak data, multikolinieritas akan cenderung turun

3.3.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Untuk melakukan pengujian atas variasi error peramalan, maka dilakukan uji heteroskedastisitas untuk menguji bahwa error peramalan tidak sama untuk

semua pengamatan [$E(u_i^2) = \sigma_i^2$]. Pengujian dilakukan dengan plot e_i^2 terhadap y_i atau x_i , tidak disarankan karena keterbatasan pengamatan.

Uji statistik dengan menggunakan White Heteroskedasticity Test. Nilai Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey ($obs \cdot R\text{-squared}$) akan mengikuti distribusi Chi-square dengan dof sebanyak jumlah variabel bebas pada *auxiliary regression*-nya.

Secara umum hipotesis yg digunakan adalah :

H_0 : $E(u_i^2) = \sigma_i^2$, tidak ada heteroskedastisitas

H_1 : $E(u_i^2) \neq \sigma_i^2$, ada heteroskedastisitas

Jika nilai $obs \cdot R\text{square} < \text{chi-square}$ maka tidak ada heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini perlu dilakukan karena adanya akibat yang ditimbulkan jika asumsi tersebut dilanggar, yaitu:

- Nilai koefisien un-biased
- Varians estimasi koefisien regresi tdk minimal lagi, sehingga cenderung menghasilkan keputusan bahwa variable yang diuji tidak signifikan pengaruhnya. Namun perlu diperhatikan bahwa jika dalam suatu model regresi ada masalah heteroskedastisitas sementara hasil pengujian parsial (uji-t) dan overall (uji-F) menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan maka masalah tersebut tidak perlu diatasi

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan beberapa cara, antara lain adalah transformasi ke dalam bentuk double log, weighted least square atau menggunakan GLS (Generalized Least Square)

3.3.3.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara error dari suatu observasi dengan error dari observasi lainnya. Autokorelasi biasanya terjadi pada data *time series*, yaitu apabila error suatu observasi mempengaruhi error observasi pada periode berikutnya. Autokorelasi biasanya tidak muncul pada data *cross section*, karena hanya menunjukkan satu titik waktu saja.

Untuk mendeteksinya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara :

- a. Keberadaan outokorelasi dapat dideteksi dengan *Durbin Watson Test* yang membandingkan nilai DW hitung dengan nilai atas bawah (d_L) dan batas atas (d_U) dari tabel Durbin Watson berdasarkan jumlah observasi dan variabel bebas. Selang kepercayaan untuk menganalisis autokorelasi dibagi menjadi 5 daerah yaitu:
1. Daerah A untuk nilai uji DW $< d_L$ (korelasi positif)
 2. Daerah B yaitu untuk $d_L < \text{nilai uji DW} < d_U$ (tidak dapat disimpulkan ada atau tidaknya autokorelasi)
 3. Daerah C, yaitu $d_L < \text{nilai uji DW} < 4 - d_U$ (tidak ada autokorelasi)
 4. Daerah D, yaitu $4 - d_U < \text{nilai uji DW} < 4 - d_L$ (tidak dapat disimpulkan ada atau tidaknya autokorelasi)
 5. Daerah E, yaitu $4 - d_L < \text{DW} < 4$ (korelasi positif)
- b. Menggunakan Correlograms dan Q stats, jika tidak ada autokorelasi maka nilai ACF, PACF pada seluruh lag mendekati Nol dan seluruh Q-stat tidak signifikan.
- c. Uji statistik dengan menggunakan Breusch-Godfrey (BG) Test. Nilai statistic dari BG-test ($\text{obs} \cdot R\text{-squared}$) akan mengikuti distribusi Chi-square dengan dof sebanyak lagnya.

Secara umum hipotesis yg digunakan adalah :

$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_l = 0$, tidak ada autokorelasi

$H_1 : \rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_l \neq 0$, ada autokorelasi

Jika nilai $\text{obs} \cdot R\text{square} < \text{chi-square}$ maka tidak ada autokorelasi

Akibat yang ditimbulkan jika terjadi autokorelasi adalah meskipun hasil estimasinya unbiased, namun standar error koefisien regresinya terlalu rendah sehingga hasil pengujian secara parsial cenderung signifikan.

Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan beberapa cara :

- a. Mentransformasi variable terikat dan bebas dengan $Y^*_t = Y_t - rY_{t-1}$;
 $X^*_t = X_t - rX_{t-1}$
- b. Metode pembedaan pertama (first difference) : $Y^*_t = Y_t - Y_{t-1}$;
 $X^*_t = X_t - X_{t-1}$; disini r diasumsikan = 1
- c. Prosedur iterasi Cochrane-Orcutt, kecenderungannya adalah Autoregressive pertama [AR(1)] atau Autoregressive kedua [AR(2)]

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset < Rp. 1 Trilyun

Dengan mengacu pada model dasar yang akan digunakan pada studi ini, maka berdasarkan output pada aplikasi Eviews untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun diperoleh persamaan yang menghasilkan nilai R-Squared yang tinggi serta uji signifikansi keseluruhan model yang signifikan, namun disertai adanya variabel SBH yang tidak signifikan dengan nilai Prob t-stat yang lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$ yaitu sebesar 0,1648, menunjukkan adanya indikasi terjadinya multikolinieritas. Untuk memperbaiki adanya unsur multikolinieritas dilakukan pengurangan variabel bebas SBH yang merupakan variabel yang menunjukkan korelasi yang tinggi dengan variabel bebas lainnya yaitu variabel BIR. Adapun hasil pengujian autokorelasi menunjukkan adanya indikasi terjadi autokorelasi dengan hasil prob Chi Square lebih besar dari nilai α . Kemudian untuk memperbaiki pelanggaran asumsi tersebut dilakukan penambahan variabel BIR dengan lag 1 dan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$KYD = 1850426 - 1360061 BIR_{t-1} + 0.408963 DPK$$

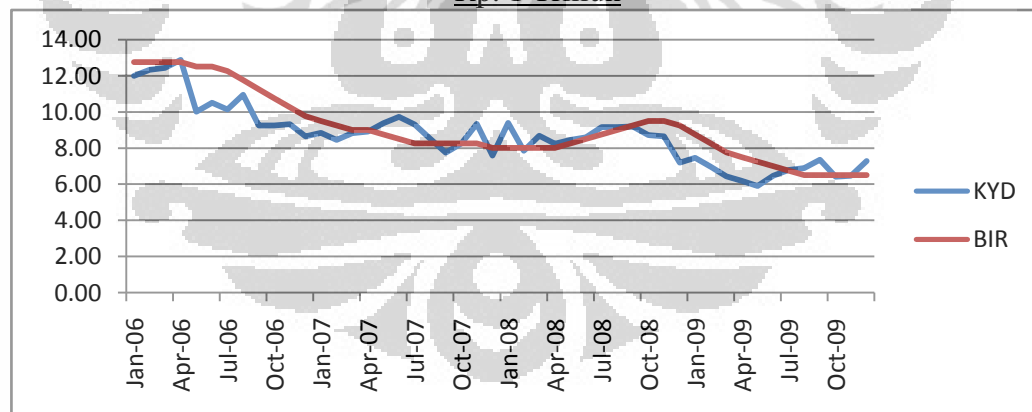
$$(0,0000) \quad (0,00010) \quad (0,0000) \quad R\text{-Squared} = 0,92$$

$$\text{Adj R-Squared} = 0,92 \quad F\text{-Stat} = 179,43 \quad \text{Prob F-Stat} = 0,0000$$

Seluruh variabel bebas pada persamaan tersebut menunjukkan angka signifikan pada tingkat $\alpha=5\%$, hal tersebut berarti bahwa masing-masing variabel bebas memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel terikat. Variabel BIR menunjukkan nilai negatif yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 basis point BI Rate akan menurunkan jumlah kredit yang diberikan oleh kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun sebesar Rp. 1.360,061 milyar, *ceteris paribus*. Hal tersebut menunjukkan terjadinya adanya respon yang sesuai dengan tujuan perubahan kebijakan moneter yang dicerminkan dengan perubahan BI Rate, yaitu pada saat terjadi penurunan BI Rate maka jumlah kredit yang diberikan oleh kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun akan mengalami peningkatan dan sebaliknya. Berikut grafik yang menggambarkan pergerakan BI Rate dan jumlah kredit yang diberikan pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun:

Grafik 4.1.

Trend perubahan BI Rate dan KYD pada kelompok bank dengan jumlah aset < Rp. 1 Triliun



Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2006 sampai dengan 2009 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia – 2006 sampai dengan 2009

Kemudian variabel DPK pada kelompok bank ini memiliki nilai positive karena DPK merupakan sumber pendanaan utama bagi bank untuk menjalankan bisnis utama bank yaitu penyaluran kredit. Nilai koefisien sebesar 0.408963

berarti bahwa setiap terjadi kenaikan Rp. 1 juta pada jumlah DPK, maka hal tersebut akan berdampak pada kenaikan kredit sebesar Rp. 0.408963 juta.

Hasil estimasi model yang memberikan nilai F-Statistik yang signifikan dan adj R-Squared yang tinggi menjelaskan bahwa model yang digunakan cukup baik. Kemampuan model untuk menjelaskan variasi pada variabel-variabel terikat adalah sebesar 92%.

5.2 Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun

Dengan mengacu pada model dasar yang akan digunakan pada studi ini, maka berdasarkan output pada aplikasi Eviews untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KYD = 48688346 - 2241977BIR + 0.516667 DPK + 0.572971SBH$$

$$(0,0212) \quad (0,0001) \quad (0,0004) \quad (0,0590)$$

$$R\text{-Squared} = 0,511080 \quad \text{Adj R-Squared} = 0,476970 \quad F\text{-Stat} = 14,98300$$

$$\text{Prob F-Stat} = 0,000001$$

Hasil persamaan di atas menunjukkan adanya indikasi terjadinya autokorelasi dengan nilai DW sebesar 0.27 yang berada di bawah D_L , kemudian untuk memperbaiki autokorelasi tersebut ditambahkan variabel AR(1). Dari hasil persamaan yang menunjukkan R^2 yang tinggi namun disertai adanya uji t pada variabel bebas yg tidak signifikan maka hal tersebut mengindikasikan terjadinya multikolinieritas. Oleh sebab itu dilakukan pengurangan variabel bebas yaitu DPK dan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$KYD = 127000000 - 2341115 BIR + 0.552095 SBH$$

$$(0,0000) \quad (0,0096) \quad (0,02217)$$

R-Squared = 0,699 Adj R-Squared = 0,677 F-Stat = 32.52

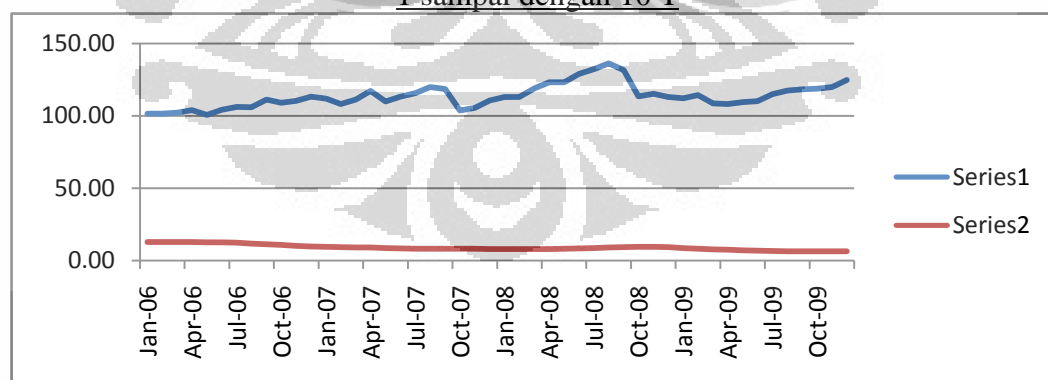
Prob F-Stat = 0,000001 DW = 1.77

Tanda koefisien negatif sebesar - 2341115 menunjukkan hubungan yang tidak searah antara BI Rate dengan KYD pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat terjadi penurunan 1 basis point BI Rate maka akan terjadi peningkatan KYD sebesar Rp. 2.341,115 juta. Hal tersebut menunjukkan terjadinya adanya respon yang sesuai dengan tujuan perubahan kebijakan moneter yang dicerminkan dengan perubahan BI Rate. Dengan penambahan variabel AR(1) maka nilai DW yang ditunjukkan pada persamaan tersebut menunjukkan nilai yang berada pada area tidak adanya autokorelasi yaitu pada area $d_L < \text{nilai uji DW} < 4 - d_U$.

Berikut grafik yang menggambarkan pergerakan BI Rate dan jumlah kredit yang diberikan pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun:

Grafik 2.

Trend perubahan BI Rate dan KYD pada kelompok bank dengan jumlah aset Rp. 1 sampai dengan 10 T



Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2006 sampai dengan 2009 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia – 2006 sampai dengan 2009

Variabel SBH memiliki nilai positive karena DPK merupakan sumber pendanaan utama bagi bank untuk menjalankan bisnis utama bank yaitu

penyaluran kredit. Nilai koefisien sebesar 0.552095 berarti bahwa setiap terjadi kenaikan Rp. 1 juta pada jumlah SBH, maka hal tersebut akan berdampak pada kenaikan kredit sebesar Rp. 0.552095 juta.

Hasil estimasi model yang memberikan nilai F-Statistik yang signifikan menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup baik. Kemampuan model untuk menjelaskan variasi pada variabel-variabel terikat adalah sebesar 69.9%.

5.3 Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun

Dengan mengacu pada model dasar yang akan digunakan pada studi ini, maka berdasarkan output pada aplikasi Eviews untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{KYD} = 207000000 - 12156041 \text{ BIR} + 0.410598 \text{ DPK} + 1,104956 \text{ SBH}$$

$$(0,0151) \quad (0,0001) \quad (0,0327) \quad (0,1451)$$

$$\text{R-Squared} = 0,719493 \quad \text{Adj R-Squared} = 0,699923 \quad \text{F-Stat} = 36,76462$$

$$\text{Prob F-Stat} = 0,0000 \quad \text{DW} = 0,1391$$

Nilai R-Squared yang cukup tinggi serta uji signifikansi keseluruhan model yang signifikan, namun disertai adanya variabel SBH yang tidak signifikan dengan nilai Prob T-stat yang lebih besar dari nilai $\alpha = 10\%$ yaitu sebesar 0,1451, menunjukkan adanya indikasi terjadinya multikolinieritas. Selain hal tersebut rendahnya nilai DW sebesar 0,1391 menunjukkan adanya autokorelasi. Untuk memperbaiki pelanggaran asumsi tersebut dilakukan penambahan variabel AR(1) sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{KYD} = 161136176 + 15403842 \text{ BIR} + 0,638528 \text{ DPK} + 0,622302 \text{ SBH}$$

$$(0,0000) \quad (0,0000) \quad (0,0000) \quad (0,00010)$$

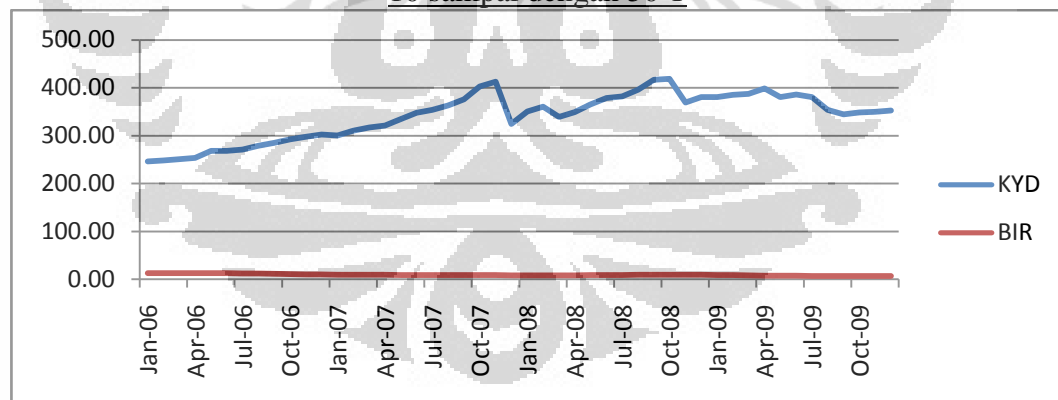
R-Squared = 0,989 Adj R-Squared = 0,988 F-Stat = 964,45

Prob F-Stat = 0,0000 DW = 1.794

Seluruh variabel bebas pada persamaan tersebut menunjukkan angka signifikan pada tingkat $\alpha=5\%$, hal tersebut berarti bahwa masing-masing variabel bebas memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel terikat. Variabel BIR menunjukkan nilai positif yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 basis point BI Rate akan meningkatkan jumlah kredit yang diberikan oleh kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun sebesar Rp. 15.403.842 milyar, *ceteris paribus*. Hal tersebut menunjukkan terjadinya respon yang tidak sesuai dengan tujuan perubahan kebijakan moneter yang dicerminkan dengan perubahan BI Rate. Berikut grafik yang menggambarkan pergerakan BI Rate dan jumlah kredit yang diberikan pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun:

Grafik 3.

Trend perubahan BI Rate dan KYD pada kelompok bank dengan jumlah aset Rp. 10 sampai dengan 50 T



Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2006 sampai dengan 2009 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia – 2006 sampai dengan 2009

Variabel DPK memiliki nilai positif karena DPK merupakan sumber pendanaan utama bagi bank untuk menjalankan bisnis utama bank yaitu penyaluran kredit. Nilai koefisien sebesar 0,638528 berarti bahwa setiap terjadi

kenaikan Rp. 1 juta pada jumlah DPK, maka hal tersebut akan berdampak pada kenaikan kredit sebesar Rp. 0,638528 juta.

Variabel SBH memiliki nilai positif sebesar 0,638528 berarti bahwa setiap terjadi kenaikan Rp. 1 juta pada jumlah DPK, maka hal tersebut akan berdampak pada kenaikan kredit sebesar Rp. 0,638528 juta.

Hasil estimasi model yang memberikan nilai F-Statistik yang signifikan dan adj R-Squared yang tinggi menjelaskan bahwa model yang digunakan cukup baik. Kemampuan model untuk menjelaskan variasi pada variabel-variabel terikat adalah sebesar 98,8 %.

5.4 Hasil Estimasi Persamaan untuk Kelompok Bank dengan Jumlah Kepemilikan Aset > Rp. 50 Trilyun

Dengan mengacu pada model dasar yang akan digunakan pada studi ini, maka berdasarkan output pada aplikasi Eviews untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$KYD = -240000000 + 2934988 BIR + 0.820750 DPK + 1,020423SBH$$

$$(0,0000) \quad (0,2713) \quad (0,0000) \quad (0,0002)$$

$$R\text{-Squared} = 0,991640 \quad \text{Adj } R\text{-Squared} = 0,991056 \quad F\text{-Stat} = 1700,107$$

$$\text{Prob } F\text{-Stat} = 0,0000 \quad DW = 0.591$$

Nilai *R-Squared* yang sangat tinggi serta uji signifikansi keseluruhan model yang signifikan, namun disertai adanya variabel BIR yang tidak signifikan dengan nilai Nilai DW sebesar 0.591 berada di bawah D_L menunjukkan adanya indikasi unsur autokorelasi. Untuk mengatasi permasalahan autokorelasi ditambahkan variabel AR(1) kemudian menghasilkan persamaan yang dengan DW yang berada pada area tidak ada autokorelasi yaitu sebesar 1,76 namun uji t pada variabel BIR masih menunjukkan nilai yang tidak signifikan. Uji heteroskedastisitas

menunjukkan nilai prob Chi-Squared sebesar 0.0130 yang berada di bawah $\alpha = 5\%$ mengindikasikan adanya unsur heteroskedastisitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan persamaan *double log* dan pengurangan variabel SBH untuk memperoleh persamaan terbaik sebagai berikut:

$$\log \text{KYD} = - 0.3065 + 0.2156 \log \text{BIR} + 0.996 \log \text{DPK}$$

(0,0397) (0,0000)

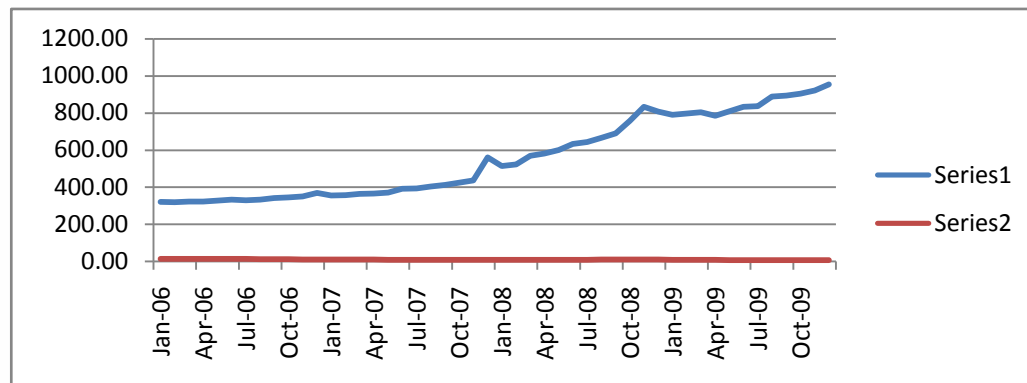
R-Squared = 0,99 Adj R-Squared = 0,99 F-Stat = 6900,73

Prob F-Stat = 0,0000 DW = 1.899

Seluruh variabel bebas pada persamaan tersebut menunjukkan angka signifikan pada tingkat $\alpha=5\%$, hal tersebut berarti bahwa masing-masing variabel bebas memiliki dampak yang signifikan terhadap variabel terikat. Pada model tersebut telah dilakukan uji heterokedastisitas dan autokorelasi dengan hasil yang menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi pada model tersebut. Variabel log BIR menunjukkan nilai positif yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan 1% pada perubahan BI Rate akan meningkatkan pertumbuhan jumlah kredit yang diberikan oleh kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun sebesar 21.5%, *ceteris paribus*. Hal tersebut menunjukkan terjadinya adanya respon yang tidak sesuai dengan tujuan perubahan kebijakan moneter yang dicerminkan dengan perubahan BI Rate. Berikut grafik yang menggambarkan pergerakan BI Rate dan jumlah kredit yang diberikan pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun:

Grafik 4.

Trend perubahan BI Rate dan KYD pada kelompok bank dengan jumlah aset > 50 T



Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2006 sampai dengan 2009 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia – 2006 sampai dengan 2009

Variabel log DPK memiliki nilai positif sebesar 0,996 yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan 1% pada perubahan BI Rate maka akan terjadi kenaikan pertumbuhan KYD pada kelompok dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun sebesar 99,6%. Hal tersebut mencerminkan aktivitas penggunaan dana bank yang sangat didominasi oleh penggunaan dana dalam bentuk penyaluran kredit, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas bank sebagai lembaga intermediasi yang berperan untuk mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya bagi pihak yang memerlukan dana dalam bentuk kredit.

Hasil estimasi model yang memberikan nilai F-Statistik yang signifikan dan adj R-Squared yang tinggi menjelaskan bahwa model yang digunakan cukup baik. Kemampuan model untuk menjelaskan variasi pada variabel-variabel terikat adalah sebesar 99 %.

5.5 Dampak BI Rate, Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Surat Berharga yang Dimiliki terhadap Jumlah Kredit yang diberikan pada Industri Perbankan Secara Keseluruhan

Dari keseluruhan hasil studi menjelaskan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit lebih efektif berjalan melalui bank-bank kecil. Hal yang tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung

(1998), Kishan Opiela (2000) menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit lebih efektif terjadi pada bank-bank kecil.

Selanjutnya dengan adanya hasil yang menunjukkan adanya kelompok bank yaitu kelompok bank III dan IV yang bergerak tidak sesuai tujuan perubahan kebijakan moneter, maka perlu diketahui seberapa besar pangsa aset maupun kredit dari masing-masing kelompok sehingga dapat diketahui apakah perilaku kelompok III dan IV berdampak signifikan terhadap efektivitas kebijakan moneter. Oleh karena itu berikut data aset dan kredit seluruh kelompok beserta pangsa pada masing-masing kelompok:

Tabel 4.1.

Pangsa aset dan kredit pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun, kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun, kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun, dan kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun tahun 2006

KELOMPOK BANK	ASET		KREDIT	
	JUMLAH (dlm trilyun rupiah)	PANGSA	JUMLAH (dlm trilyun rupiah)	PANGSA
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun	15,51	1,03%	8,315	1,16%
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10Trilyun	177,5	11,77%	88,069	12,32%
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun	537,76	35,64%	224,46	31,39%
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun	777,93	51,56%	394,25	55,13%
	1.508,70	100,00%	715,094	100,00%

Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2006 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia - 2006

Tabel 2.

Pangsa aset dan kredit pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun, kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun, kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun, dan kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun tahun 2007

KELOMPOK BANK	ASET		KREDIT	
	JUMLAH (dlm trilyun rupiah)	PANGSA	JUMLAH (dlm trilyun rupiah)	PANGSA
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun	13,75	0,71%	8,972	0,92%
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10Trilyun	193,49	9,98%	106,64	10,89%
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun	581,96	30,02%	303,61	31,01%
Kelompok Bank dengan jumlah	1.149,40	59,29%	559,94	57,19%

kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun				
	1.938,60	100,00%	979,162	100,00%

Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2007 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia - 2007

Tabel 3.

Pangsa aset dan kredit pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun, kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun, kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun, dan kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun tahun 2008

KELOMPOK BANK	ASET		KREDIT	
	JUMLAH (dlm trilyun rupiah)	PANGSA	JUMLAH (dlm trilyun rupiah)	PANGSA
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun	14,87	0,72%	11,51	0,94%
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10Trilyun	200,5	9,72%	119,725	9,80%
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50	647,43	31,38%	402,594	32,94%

Trilyun				
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun	1.200,15	58,18%	688,4	56,32%
	2.062,95	100,00%	1222,229	100,00%

Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2008 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia - 2008

Tabel 4.

Pangsa aset dan kredit pada kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun, kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10 Trilyun, kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun, dan kelompok bank dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun tahun 2009

KELOMPOK BANK	ASET		KREDIT	
	JUMLAH (dlm trilyun rupiah)	PANGSA	JUMLAH (dlm trilyun rupiah)	PANGSA
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun	12.31	0.51%	109.185	4.58%
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 1 sampai dengan 10Trilyun	191.44	7.90%	319.07	13.38%
Kelompok Bank dengan jumlah kepemilikan aset Rp. 10 sampai dengan 50 Trilyun	557.43	23.00%	897.016	37.61%
Kelompok Bank	1,662.55	68.59%	1059.64	44.43%

dengan jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun				
	2,423.73	100.00%	2384.911	100.00%

Sumber data : Laporan Bulanan Bank Umum 2009 dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia - 2009

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 sampai dengan 2009 kelompok bank III dan IV menguasai hampir seluruh pangsa aset perbankan nasional, sedangkan kelompok bank I dan II memiliki pangsa aset yang rendah yaitu sekitar 10%. Demikian pula sejalan dengan pangsa aset pada kelompok bank, pangsa jumlah kredit yang diberikan pada kelompok bank III, dan IV menguasai pangsa kredit mencapai porsi 90% serta pangsa kredit dari kelompok bank I dan II mencapai sekitar 10 % pangsa dari total kredit perbankan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku kelompok bank III dan IV yang bergerak tidak sesuai tujuan kebijakan moneter bank sentral menggambarkan perilaku industri perbankan secara keseluruhan, karena pangsa yang dimiliki kelompok bank tersebut sangat besar. Sehingga secara umum industri perbankan memberikan respon dalam bentuk pemberian jumlah kredit yang tidak sesuai dengan tujuan kebijakan moneter yang dicerminkan dalam perubahan BI Rate. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa kebijakan moneter ketat yang dicerminkan dengan peningkatan BI Rate akan berdampak pada penurunan jumlah kredit yang akan diberikan oleh bank, serta sebaliknya pada saat diambil kebijakan moneter longgar dengan penurunan BI Rate maka akan berdampak pada peningkatan jumlah kredit yang diberikan oleh bank. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik masing-masing kelompok bank, bank-bank besar pada umumnya memiliki nasabah yang berbeda dengan bank kecil. Dengan besarnya pangsa yang dimiliki membuat bank besar memiliki akses yang luas sehingga walaupun terjadi kenaikan tingkat suku bunga, kelompok bank besar masih dapat meningkatkan penyaluran kreditnya. Sebaliknya kelompok bank kecil yang memiliki pangsa yang kecil memiliki keterbatasan pasar, sehingga pada saat terjadi kenaikan suku bunga yang berdampak pada peningkatan biaya dananya, akan mengakibatkan penurunan kemampuan kelompok bank tersebut dalam melakukan penyaluran

kredit. Hal tersebut selain disebabkan oleh keterbatasan sumber dana yang dimiliki, juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses yang mengakibatkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau pasar yang potensial.

Dari keseluruhan nilai koefisien hubungan antara jumlah DPK dengan jumlah KYD yang menunjukkan nilai positif dapat diketahui bahwa bahwa fungsi intermediasi masih berjalan cukup efektif pada industry perbankan Indonesia. Hal tersebut dicerminkan dengan adanya peningkatan jumlah DPK yang diikuti dengan peningkatan jumlah KYD pada perbankan Indonesia. Komposisi DPK yang dimiliki perbankan Indonesia didominasi oleh dana berbiaya mahal dalam bentuk deposito. Data pada tahun 2009 menunjukkan komposisi DPK terdiri dari deposito sebesar 47,27%, tabungan sebesar 28,23%, dan giro sebesar 24,50%. Selanjutnya berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Mei 2009, porsi dana di atas Rp. 2 miliar mencapai 46% dari total DPK. Tingginya komposisi dana yang berasal dari sumber dana deposito akan mengakibatkan tingginya beban biaya yang harus ditanggung oleh perbankan, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan tingginya bunga kredit yang ditawarkan oleh bank.

Dari keseluruhan hasil penelitian yang mempelajari peranan perbankan dalam mendukung transmisi kebijakan moneter dari jalur kredit, maka dapat diketahui bahwa bank yang memiliki aset kecil lebih efektif dalam merespon perubahan kebijakan moneter sesuai arah yang diharapkan oleh bank sentral.

5.3 Kebijakan Bank Indonesia

Dari hasil estimasi di atas dapat diketahui bahwa kebijakan konsolidasi bank merupakan hal yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Hasil penelitian yang menunjukkan hasil bahwa bank besar memberikan respon yang tidak sesuai dengan tujuan arah kebijakan moneter dimana transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit lebih efektif terjadi pada bank besar, serta hasil penelitian dari hubungan DPK dengan KYD yang menunjukkan bahwa bank besar memberikan fungsi perantara yang lebih efektif, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan harus memperkuat aset

dan permodalannya agar dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan moneter oleh bank sentral. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang mendukung pada penguatan aset dan permodalan bank yang salahsatunya dapat dilakukan dengan konsolidasi bank (merger). Konsolidasi bank (merger) merupakan suatu alternatif dalam memenuhi ketentuan untuk memperkuat modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan yang diambil BI melalui salahsatu pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sudah tepat, yaitu Penguatan Struktur Perbankan Indonesia yang ditujukan pada arah pengembangan struktur perbankan Indonesia menjadi sebagai berikut:

- 2 sampai 3 bank yang berpotensi dan mampu beroperasi dalam skala internasional dengan modal di atas Rp. 50 Trilyun
- 3 sampai 5 bank umum nasional dengan cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional, yaitu bank yang memiliki modal Rp. 10 trilyun sampai dengan Rp. 50 triliun
- 30 sampai 50 bank umum yang kegiatan usahanya fokus pada segmen usaha tertentu sesuai kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank, yaitu bank yang memiliki modal antara Rp. 100 miliar sampai dengan Rp. 10 triliun
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yaitu bank yang memiliki modal di bawah Rp. 100 miliar.

Kebijakan penguatan permodalan menghasilkan perkembangan yang positif, dimana sampai sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan merger dalam rangka pemenuhan ketentuan permodalan dimaksud pada beberapa bank sebagai berikut:

1. Pada tahun 2006 dilakukan merger Bank UFJ dengan Bank of Tokyo Mistubishi
2. Pada tahun 2007 dilakukan merger 4 (empat) bank sebagai berikut:
 - a. Bank Arta Niaga Kencana dengan Bank Commonwealth
 - b. Bank Windu Kentjana dengan Bank Multicor
3. Pada tahun 2008 telah dilakukan merger 7 bank sebagai berikut:
 - a. Bank Harmoni International dengan Bank Index Selindo
 - b. Bank Haga dan Bank Hagakita dengan Bank Rabobank
 - c. Bank Lippo dengan Bank Niaga

Dengan demikian total bank pada posisi akhir tahun 2009 adalah sebanyak 121 bank. Kebijakan lain yang diambil Bank Indonesia untuk mewujudkan struktur perbankan yang sehat dan kuat melalui konsolidasi perbankan adalah melalui penerapan kebijakan kepemilikan tunggal (*single presence policy*) yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia juga bertujuan untuk mendukung efektivitas pengawasan bank melalui pengawasan bank secara terkonsolidasi. Pokok kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada satu (1) Bank Umum di Indonesia. Untuk kewajiban penyesuaian struktur kepemilikan saham dimaksud, PSP dapat memilih beberapa alternatif yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan kepemilikan tunggal, yaitu konsolidasi perbankan dan efektivitas pengawasan bank dengan tetap memperhatikan kepentingan para PSP yang sudah menanamkan modalnya di perbankan Indonesia. Alternatif yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang telah menjadi PSP pada lebih dari satu bank adalah sebagai berikut:

- a. Mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi PSP pada satu bank
- b. Melakukan merger/konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya
- c. Membentuk *Bank Holding Company*

Bank Holding Company adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang merupakan anak perusahaannya. BHC mempunyai tugas untuk:

- a. Menetapkan program kerja strategis BHC.
- b. Memberikan arah strategis untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan, dan mengkonsolidasikan program kerja bank-bank yang menjadi anak perusahaan.
- c. Menyetujui program kerja strategis bank-bank yang menjadi anak perusahaan. Jangka waktu program kerja strategis tersebut paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan.

- d. Mengawasi pelaksanaan program kerja strategis.
- e. Mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaan dengan laporan keuangan BHC serta membuat laporan konsolidasi lainnya sesuai PBI.

Kebijakan yang juga telah tepat dijalankan untuk mendukung penguatan struktur perbankan dari sisi permodalan adalah PBI No. 7/15/PBI/2005 Tentang Jumlah Inti Minimum Bank Umum yang menyebutkan bahwa Bank Umum diwajibkan memiliki modal inti⁴ minimal sebanyak Rp. 80 Milyar pada akhir tahun 2007 dan diharapkan semua bank memiliki modal inti minimal sebesar Rp. 100 Milyar pada akhir tahun 2010.

Bagi bank yang belum memenuhi jumlah minimal modal dapat memenuhi kewajiban modal melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, merger, konsolidasi dan akuisisi⁵.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung penguatan struktur permodalan perbankan Indonesia yang diharapkan akan meningkatkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mendukung pencapaian tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia.

⁴ Modal Inti adalah modal disetor dan cadangan tambahan modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank.

⁵ Merger adalah penggabungan 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salahsatu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi lebih dahulu. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2(dua) bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi lebih dahulu. Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan perbedaan respon berupa keputusan pemberian kredit yang diberikan oleh bank dalam beberapa kelompok berdasarkan jumlah kepemilikan aset terhadap perubahan kebijakan moneter yang dicerminkan oleh perubahan BI Rate diperoleh hasil sebagai berikut:

	Kelompok Bank			
	Jumlah kepemilikan aset < Rp. 1 Trilyun	Jumlah kepemilikan aset Rp. 1 s.d 10 Trilyun	Jumlah kepemilikan aset Rp. 10 s.d 50 Trilyun	Jumlah kepemilikan aset > Rp. 50 Trilyun
Koefisien hubungan Perubahan BI Rate terhadap KYD	-1.360,061	-2341115	15403842	0.2156
Kesimpulan	Peningkatan 1 basis point BI Rate akan mengakibatkan penurunan Rp. 1.360,061 milyar	Peningkatan 1 basis point BI Rate akan mengakibatkan penurunan Rp. 2.341,115 milyar	Peningkatan 1 basis point BI Rate akan mengakibatkan peningkatan Rp. 15.403,842 milyar	Peningkatan 1% perubahan BI Rate akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan KYD sebesar 21,56%

Berdasarkan data tersebut maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil estimasi hubungan antara perubahan BI Rate dengan perubahan jumlah kredit yang diberikan pada beberapa kelompok bank dapat ditarik kesimpulan bahwa bank yang memiliki modal kecil memberikan respon yang sesuai dengan arah kebijakan moneter yaitu menurunkan pemberian kredit

pada saat diambil kebijakan moneter ketat dan menaikkan jumlah pemberian kredit pada saat diambil kebijakan moneter longgar.

2. Dari hasil estimasi hubungan antara perubahan DPK dengan perubahan jumlah kredit yang diberikan pada beberapa kelompok bank dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi intermediasi bank berjalan cukup efektif pada keseluruhan industri perbankan Indonesia. Adapun dari sisi komposisi DPK yang dimiliki perbankan dapat diketahui bahwa porsi terbesar dari DPK perbankan Indonesia adalah berupa deposito.

Dari butir-butir kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa **bank kecil lebih efektif dalam mendukung berjalannya mekanisme transmisi kebijakan moneter khususnya melalui jalur kredit.**

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menentukan arah kebijakan perbankan terkait struktur aset perbankan Indonesia, otoritas perbankan sebaiknya mempertimbangkan respon dari masing-masing kelompok bank dalam merespon transmisi kebijakan moneter. Mengingat hasil penelitian yang menunjukkan perilaku bank besar yang memberikan respon terhadap perubahan BI Rate dalam bentuk pemberian kredit yang tidak sesuai arah kebijakan moneter sehingga dapat dipertimbangkan kebijakan yang dapat mendorong bank besar untuk memberikan respon yang sesuai dengan tujuan arah kebijakan monetr bank sentral.
2. Dengan mempertimbangkan arah Arsitektur Perbankan Indonesia yang lebih mengarahkan pada pembentukan struktur perbankan Indonesia yang terdiri dari bank-bank yang memiliki jumlah aset yang kuat, perlu dipertimbangkan perihal efektifitas bank yang memiliki aset besar dalam merespon perubahan kebijakan moneter.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Masyhud H. (2004) “Asset Liability Management” Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Cheng Hsiao. (1999) “Analysis of Panel Data” USA, Cambridge University Press.
- Friady Ammaludin, “Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter antara Bank Syariah dan Bank Konvensional”. Tesis – FE UI
- Gujarati Damodar. (1995) “*Basic Econometric*” Singapore, McGraww Hill
- Hubbard, Glenn R. (2002) “*Money, The Financial System, and the Economy*” Boston, Pearson Education.
- Halim Alamsyah, Doddy Zulverdy, Imam Gunadi, Rendra Z. Idris, Bambang Pramono (2002), “*Banking Disintermediation and its implication for monetary policy : Case in Indonesia*” Jurnal Ekonomi dan Moneter
- Laporan Bulanan Bank Umum 2006 – Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan – Bank Indonesia
- Laporan Bulanan Bank Umum 2007 – Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan – Bank Indonesia
- Laporan Bulanan Bank Umum 2008 – Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan – Bank Indonesia
- Laporan Bulanan Bank Umum 2009 – Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan – Bank Indonesia
- Laporan Perkembangan Perbankan 2006 – Direktorat Penelitian dan Pengembangan Perbankan – Bank Indonesia
- Laporan Perkembangan Perbankan 2007 – Direktorat Penelitian dan Pengembangan Perbankan – Bank Indonesia
- Laporan Perkembangan Perbankan 2008 – Direktorat Penelitian dan Pengembangan Perbankan – Bank Indonesia
- Laporan Perkembangan Perbankan 2009 – Direktorat Penelitian dan Pengembangan Perbankan – Bank Indonesia
- Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia 2006 – Bank Indonesia

Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia 2007 – Bank Indonesia

Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia 2008 – Bank Indonesia

Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia 2009 – Bank Indonesia

Miskhin, Frederick S. (2007), *“The Economics of Money, Banking, and Financial Market - Eight Edition”*. Canada, Pearson Education.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tentang Modal Inti Minimum Bank Umum – Bank Indonesia

Phillip Engler, Terhii Jokipii. (2007), *“The effect of capital requirement regulation on the transmission of monetary policy : evidence from Austria”*

Ruby P. Kishan, Timothy P. Opiela. (2000) “Bank Size, Bank Capital, and The Bank Lending Channel” *Journal of money, credit, and banking* Vol. 32 No.1

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia 2006 – Direktorat Riset dan Statistik Ekonomi dan Moneter – Bank Indonesia

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia 2007 – Direktorat Riset dan Statistik Ekonomi dan Moneter – Bank Indonesia

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia 2008 – Direktorat Riset dan Statistik Ekonomi dan Moneter – Bank Indonesia

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia 2009 – Direktorat Riset dan Statistik Ekonomi dan Moneter – Bank Indonesia

